



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2019**

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018 DAN 2019**



**Nomor : 19f/LHP/XV/06/2020
Tanggal : 15 Juni 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I: PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Alasan Reviu.....	5
1.3 Tujuan Reviu.....	5
1.4 Kriteria Reviu.....	5
1.5 Metode Reviu.....	6
1.6 Batasan Reviu	7
BAB II: GAMBARAN UMUM	8
2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal	8
2.2 Pengukuran Kemandirian Fiskal.....	9
BAB III: HASIL REVIU KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH	12
3.1 Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi.....	12
3.2 Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota.....	15
3.3 Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali	19
3.4 Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera	20
3.5 Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi	21
3.6 Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT dan NTB	22
3.7 Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan	23
3.8 Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku dan Papua.....	23
BAB IV: KESIMPULAN	25
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah	6
Tabel 2. Ringkasan Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi.....	14
Tabel 3. Ringkasan Kemandirian Fiskal Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota	17
Tabel 4. Kabupaten/Kota dengan predikat IKF Mandiri dan Sangat Mandiri	18
Tabel 5. Ringkasan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali	19
Tabel 6. Ringkasan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.....	20
Tabel 7. Ringkasan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi	21
Tabel 8. Ringkasan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di NTB dan NTT	22
Tabel 9. Ringkasan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan	23
Tabel 10. Ringkasan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Maluku dan Papua	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2019.....	13
Gambar 2. Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019.....	16



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

**HASIL REVIU ATAS KEMANDIRIAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018 DAN 2019**

Pengesahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menandai berlakunya otonomi daerah dalam bidang pemerintahan, dimana Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Untuk menjalankan otonomi daerah diperlukan dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, otonomi daerah perlu didukung dengan kemandirian fiskal daerah. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, maka disahkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Otonomi daerah telah berjalan lebih dari 20 tahun dan BPK telah melakukan pemeriksaan atas tata kelola keuangan daerah secara rutin. Saat ini BPK merasa sudah saatnya menjadikan kemandirian fiskal sebagai bagian dari kecukupan pengungkapan informasi di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sehingga dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menganalisis hubungan kemandirian fiskal daerah dengan fungsi otonomi daerah maupun pelayanan publik di daerah.

Indeks kemandirian fiskal daerah berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerah tanpa tergantung pada pendapatan transfer. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 280 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reviu atas kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, BPK berinisiatif untuk melakukan perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebagai bagian dari reviu kemandirian fiskal. Perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah dilakukan dengan menggunakan

formula Hunter (1977) dan pengelompokan kemandirian fiskal daerah menggunakan klasifikasi yang disusun oleh Sampurna (2019).

Hasil perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal menunjukkan adanya kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah yang sangat tinggi dan sebagian besar Pemerintah Daerah belum mandiri. Hal ini diindikasikan dengan hasil perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal berikut ini.

1. **Kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah yang sangat tinggi.** Angka indeks kemandirian fiskal TA 2019 memperlihatkan perbedaan indeks yang sangat mencolok antara Provinsi DKI Jakarta dengan indeks yang tertinggi sebesar 0,7107 dengan Provinsi Papua Barat dengan indeks yang terendah senilai 0,0427. Artinya belanja daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar 71,07 persen dapat dibiayai oleh PAD, sedangkan belanja Provinsi Papua Barat hanya sebesar 4,27 persen yang dapat dibiayai oleh PAD. Kesenjangan kemandirian fiskal juga terjadi di level kabupaten/kota di Indonesia. Dari data diketahui, Kabupaten Badung di Bali dengan nilai indeks 0,8347 dapat membiayai 83,47 persen dari belanja daerah dari PAD. Sedangkan Kabupaten Deiyai di Papua dengan nilai indeks 0,0031, artinya PAD di kabupaten tersebut hanya dapat membiayai 0,31 persen dari belanja daerah. Sebagai pembandingan, angka rata-rata untuk IKF provinsi TA 2019 adalah 0,36 dan rata-rata angka IKF kabupaten/kota adalah 0,11.
2. **Sebagian besar Pemerintah Daerah belum mandiri.** Data menunjukkan, Pemerintah Provinsi yang **Belum Mandiri** sebanyak 10 dari 34 Provinsi pada Tahun Anggaran 2018 dan turun menjadi 8 dari 34 Provinsi pada Tahun Anggaran 2019. Adapun jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang Belum Mandiri sebanyak 471 dari 508 Kabupaten/Kota pada Tahun 2018 dan turun menjadi 458 dari 497 Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2019. Patut dicermati dari daerah yang masuk kategori kabupaten/kota yang Belum Mandiri tersebut adalah terdapat sedikitnya 102 dari 458 daerah dengan nilai IKF dibawah 0,05. Hal menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut sangat tergantung dengan dana transfer, karena PAD hanya cukup untuk membiayai 5 persen belanja daerah.
3. Berdasarkan jumlah daerah yang masuk kategori **Menuju Kemandirian** pada Tahun Anggaran 2018, terdapat 16 Provinsi dan meningkat menjadi 18 Provinsi pada Tahun Anggaran 2019. Sedangkan jumlah Kabupaten/Kota yang masuk klasifikasi Menuju Kemandirian pada Tahun Anggaran 2018 sebanyak 34 dan meningkat menjadi 36 pada Tahun Anggaran 2019
4. Jumlah daerah yang telah **Mandiri** pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 adalah sama yaitu terdapat 8 Provinsi dan 2 Kota.

5. Terakhir, analisis menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 hanya terdapat satu daerah dengan klasifikasi **Sangat Mandiri**, yaitu Kabupaten Badung dan tidak terdapat Pemerintah Provinsi yang Sangat Mandiri.



Jakarta, 15 Juni 2020
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.
Ketua

Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.
Anggota/ Koordinator Pemeriksaan

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM, CPA., CSFA.
Anggota
Register Negara Akuntan No. RNA 21943

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah baru dalam desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah dimulai dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua paket UU tersebut menandai diperluasnya desentralisasi dalam bidang pemerintahan dimana Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Desentralisasi muncul akibat dari tuntutan daerah untuk diberi kewenangan dalam melakukan pembangunan di daerahnya sendiri. Karena dianggap masih terdapat kelemahan dalam kedua paket UU tersebut, maka UU tersebut kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diubah melalui UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam otonomi daerah, beberapa jenis pelayanan umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, karena Pemerintah Daerah dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat di daerahnya dibanding Pemerintah Pusat. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, karena Pemerintah Daerah dapat mengambil keputusan yang menjadi wewenangnya tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Pusat. Hal ini akan mendorong efisiensi dalam melakukan pelayanan ke masyarakat dan dalam melaksanakan pembangunan.

Salah satu konsekuensi dari otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah perluasan desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkuat dan diperluas. Kewenangan Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diperkuat dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diberlakukannya UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan terdapat peningkatan dalam kemandirian fiskal daerah.

Kemandirian fiskal sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan atau rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan. Oleh karena itu, revidi atas kemandirian fiskal daerah dipandang perlu untuk dilakukan agar kemandirian fiskal daerah bisa dipetakan dan diketahui kondisi kemandirian fiskal tiap-tiap daerah.

1.2 Alasan Revidi

Beberapa argumentasi yang melandasi pentingnya pelaksanaan revidi terhadap kemandirian fiskal daerah adalah:

1. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan salah satu agenda utama reformasi yang telah diimplementasikan sejak tahun 1999. Walaupun telah berjalan selama 20 tahun, ternyata kemandirian fiskal sebagian besar Pemerintah Daerah masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan dari desentralisasi fiskal yaitu peningkatan kapasitas fiskal daerah agar daerah dapat mendanai sendiri urusan (pelayanan) publik yang diselenggarakannya belum sepenuhnya tercapai.
2. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 280 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Revidi atas kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

1.3 Tujuan Revidi

Tujuan pelaksanaan revidi kemandirian fiskal adalah untuk menilai tingkat kemandirian fiskal daerah pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

1.4 Kriteria Revidi

Revidi kemandirian fiskal daerah akan menghasilkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) daerah. Nilai IKF berkisar antara 0 (semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD) hingga 1 (semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan

tidak terdapat dana transfer). Dengan demikian, semakin rendah nilai IKF, maka semakin Belum Mandiri. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IKF, maka semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah. Berdasarkan Sampurna (2018), kemandirian fiskal daerah dapat dikelompokkan menjadi “Belum Mandiri”, “Menuju Kemandirian”, “Mandiri” dan “Sangat Mandiri seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Klasifikasi Kondisi Kemandirian Fiskal Daerah

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$	Belum Mandiri
2	$0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$	Menuju kemandirian
3	$0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq \text{IKF} \leq 1,00$	Sangat mandiri

1.5 Metode Reviu

Reviu kemandirian fiskal daerah dilakukan melalui:

1. Kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran umum tentang otonomi daerah dan kemandirian fiskal daerah;
2. Diskusi dengan beberapa narasumber yang meliputi peneliti, staf ahli keuangan daerah, staf ahli keuangan pemerintah pusat, dan pemeriksa senior untuk mengetahui gambaran kemandirian fiskal daerah;
3. Menghitung indeks kemandirian fiskal daerah dengan formula yang dikembangkan Hunter (1977). Walaupun dikembangkan lebih dari empat puluh tahun yang lalu, Index Hunter (1977) masih sering digunakan untuk menghitung kemandirian fiskal daerah (Di Liddo et al., 2016; Lee, 2004; Shah, 1994). Karena struktur APBD di Indonesia sedikit berbeda dengan klasifikasi anggaran yang digunakan dalam *Formula Hunter* (1977) maka *Formula Hunter* (1977) yang digunakan dalam reviu ini disesuaikan dengan kondisi struktur APBD di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut tentang metode perhitungan indeks kemandirian fiskal daerah disajikan dalam Bab II.
4. Data yang dikumpulkan untuk menghitung indeks kemandirian fiskal diperoleh dari Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan terhadap 34 Pemerintah Provinsi dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

1.6 Batasan Reviu

Reviu kemandirian fiskal daerah dilakukan terhadap 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 dan 531 LKPD Tahun Anggaran 2019. Karena beberapa keterbatasan terkait wabah Covid-19, maka tidak semua Laporan Keuangan TA 2019 telah selesai diperiksa. Untuk data tahun anggaran 2019, hanya 44 LKPD yang telah selesai diperiksa (terdiri atas 2 Provinsi dan 42 Kabupaten/Kota) sedangkan 487 LKPD (32 Provinsi dan 455 Kabupaten/Kota) belum selesai diperiksa per laporan reviu ini selesai dibuat pada tanggal 14 Mei 2020. Untuk entitas yang belum selesai diperiksa, data yang digunakan adalah angka-angka sebelum pemeriksaan (*unaudited*). Sementara itu terdapat 11 Kabupaten/Kota yang belum menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 kepada BPK, sehingga angka kemandirian fiskalnya tidak dapat dihitung.

BAB II: GAMBARAN UMUM

2.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diubah melalui UU No. 9 Tahun 2015 pengertian asas otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Berdirinya daerah-daerah otonom merupakan akibat dari diberlakukannya desentralisasi pemerintahan.

Dengan diberlakukannya desentralisasi, maka sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang dapat dipilih untuk diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan wajib dibedakan menjadi urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi ketenagakerjaan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan, komunikasi dan informatika; dan koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal, kepemudaan dan olah raga; statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Selain urusan wajib, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan seperti kelautan dan perikanan; pariwisata, pertanian, kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Sebagian urusan pemerintahan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan pertimbangan bahwa pelayanan kepada masyarakat akan lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan pelayanan masyarakat memerlukan biaya yang besar, sehingga otonomi daerah akan berhasil apabila didukung dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Sumber pendapatan daerah dalam APBD terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah, bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
- Dana Perimbangan, bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.
- Pinjaman Daerah, bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- Lain-lain Pendapatan Daerah, bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain PAD, Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah.

Dari keempat jenis pendapatan daerah tersebut, hanya PAD yang berada di dalam kendali Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan PAD agar kemampuan fiskal daerah meningkat.

Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pemerintah daerah, maka disahkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui UU tersebut, Pemerintah Daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk mengumpulkan PAD melalui perluasan objek pajak daerah, retribusi daerah, dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan kepada daerah, termasuk kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka setiap daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai kebijakan dan strategi yang dikembangkan secara transparan dan akuntabel. Pemberian kewenangan dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah diharapkan dapat mendorong kemandirian fiskal daerah yang diperlukan untuk membiayai pelayanan dan pembangunan daerah dan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2.2 Pengukuran Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan

pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Salah satu metode untuk menghitung kemandirian fiskal daerah adalah dengan menggunakan *Fiscal Autonomy Index* (FAI) atau tingkat indeks kemandirian fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977). Formula Hunter (1977) tersebut telah cukup lama, tetapi masih sering digunakan untuk menghitung kemandirian fiskal daerah, walaupun para penulis biasanya tidak lagi menyebut formula tersebut sebagai Formula Hunter (1977). Formula IKF menurut Hunter (1977) adalah sebagai berikut

$$FAI = 1 - \frac{TrGP+TrSP+B+REVSH}{EXPL}, \text{ dimana:}$$

Keterangan:

- FAI : *Fiscal Autonomy Index*
 EXP_L : *Local Expenditure* (Pengeluaran daerah)
 TrGP : *General Purpose Transfer* (Dana alokasi umum)
 Tr_{SP} : *Spesific Purpose Transfer* (Dana alokasi khusus)
 B : *Subnational Borrowing* (Pinjaman daerah)
 REV_{SH} : *Revenue Sharing* (DBH)

Index Hunter (1977) dikembangkan di negara federal dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi. Formula tersebut dapat menimbulkan kerumitan apabila diterapkan di negara-negara dengan tingkat desentralisasi fiskal yang tidak tinggi, karena dapat menghasilkan indeks yang bernilai negatif. *Index Hunter* (1977) dapat bernilai negatif apabila total pendapatan non PAD (DAU + DAK + Pinjaman Daerah + DBH) lebih tinggi dari total belanja. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa peneliti menggunakan total pendapatan sebagai *proxy* untuk belanja daerah (Firdausy, 2017; Sampurna, 2018). Dengan demikian, Formula Hunter (1977) yang digunakan dalam Reviu Kemandirian Fiskal ini adalah formula Hunter yang telah disesuaikan dengan struktur APBD di Indonesia, yaitu:

$$IKF = 1 - \frac{TrGP+TrSP+B+REVSH}{REVOR + TrGP + TrSP + B + REVSH}, \text{ dimana:}$$

Keterangan:

- IKF : Index Kemandirian Fiskal;
- REV_{OR} : Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- Tr_{GP} : *General Purpose Transfer* (DAU), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa, dan Pendapatan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan)
- Tr_{SP} : Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik)
- B : *Subnational Borrowing* (Penerimaan Pinjaman Daerah)
- REV_{SH} : Dana Bagi Hasil yang terdiri atas:
- DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21;
 - DBH cukai yang bersumber dari cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - DBH sumber daya alam.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal adalah pencatatan pendapatan transfer tidak konsisten antar Pemerintah Daerah. Beberapa daerah mencatat dana desa sebagai pendapatan transfer sedangkan beberapa daerah lainnya mengeluarkannya dari dana transfer. Demikian juga dengan Dana BOS yang secara substansi sama dengan DAK Non Fisik tetapi dimasukkan sebagai Pendapatan Hibah dan tidak masuk pendapatan dana transfer. Karena struktur APBD di Indonesia sedikit berbeda dengan klasifikasi anggaran yang digunakan dalam *Formula Hunter* (1977) maka *Formula Hunter* (1977) yang digunakan dalam revidi ini disesuaikan dengan kondisi struktur APBD di Indonesia. Oleh karena itu, dalam perhitungan IKF menggunakan total pendapatan dan total pendapatan transfer sebagai *proxy* belanja. Kedua pendekatan akan menghasilkan IKF yang sama atau hampir sama.

BAB III: HASIL REVIU KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

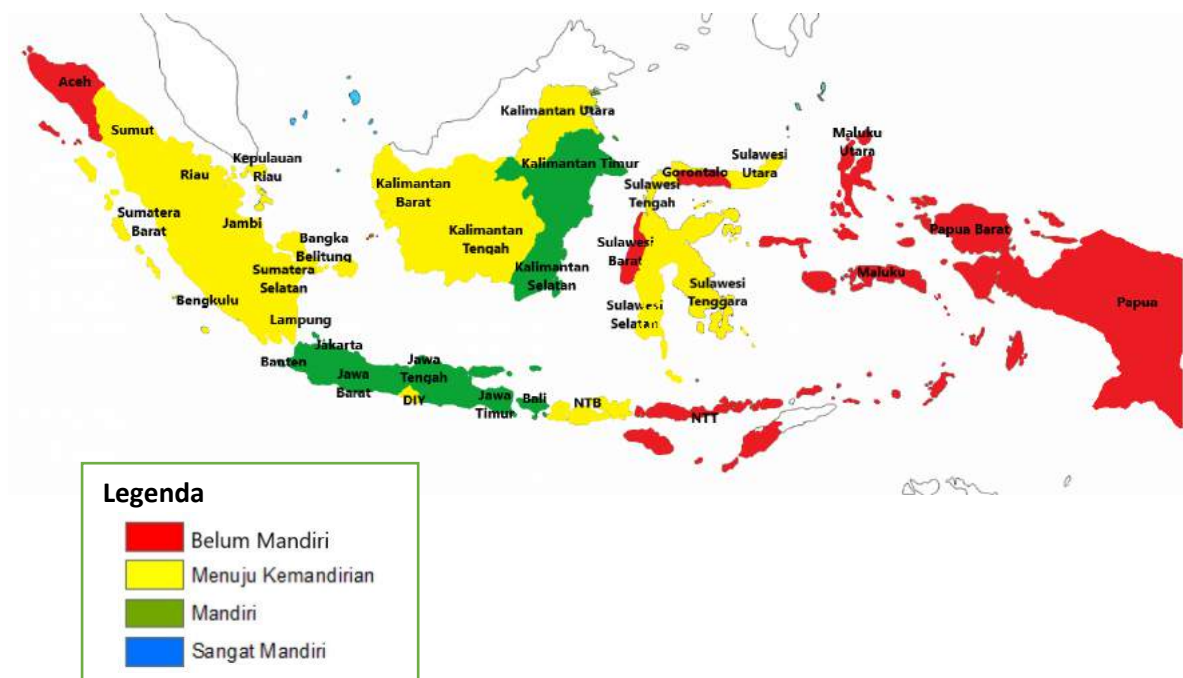
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah berdiri beberapa daerah otonomi baru sebagai pemekaran dari Pemerintah Daerah yang telah ada. Saat ini terdapat 542 Pemerintah Daerah di Indonesia yang terdiri atas 34 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota. Tujuan digulirkannya otonomi daerah ini antara lain untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah, karena asumsinya, daerahlah yang lebih mengetahui potensi dan permasalahan di wilayahnya.

Salah satu faktor penunjang keberhasilan otonomi daerah adalah kemandirian fiskal daerah. Dengan kemandirian fiskal, maka daerah akan mampu membiayai pembangunan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat tanpa tergantung dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu kemandirian fiskal daerah adalah sebuah kondisi yang harus diupayakan oleh pemerintah daerah seiring dengan pemberian otonomi oleh Pemerintah Pusat.

Menandai 20 tahun otonomi daerah, BPK merasa sudah saatnya melakukan reviu kemandirian fiskal daerah, untuk melihat sejauh mana tujuan kebijakan otonomi daerah oleh Pemerintah telah terwujud. Seperti yang diuraikan pada Bab II, reviu kemandirian fiskal dilakukan dengan menghitung indeks kemandirian fiskal menggunakan formula Hunter (1977) yang telah disesuaikan.

3.1 Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi

Beberapa urusan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Provinsi juga memberikan kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi mendapatkan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan juga diberi kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, BPK melakukan reviu terhadap kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi. Semua Pemerintah Provinsi telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK. Gambaran umum kemandirian fiskal seluruh pemerintah provinsi tahun anggaran 2019 disajikan pada Gambar 1. Warna merah menunjukkan bahwa suatu daerah tersebut Belum Mandiri, warna kuning menunjukkan suatu daerah masuk kategori Menuju Kemandirian, warna hijau berarti suatu daerah Mandiri, sedangkan warna biru menunjukkan bahwa suatu daerah telah Sangat Mandiri.



Gambar 1. Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2019

Analisis atas kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi dilakukan terhadap 34 laporan keuangan Pemerintah Provinsi. Seperti ditunjukkan pada Gambar 1, tidak ada provinsi yang masuk kategori Sangat Mandiri. Sebagian besar provinsi di Jawa dan Bali telah Mandiri sedangkan di luar Jawa dan Bali hanya dua provinsi yang mandiri yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang cukup menarik dari analisis Peta Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi adalah provinsi-provinsi yang jauh dari Ibu Kota negara yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat masuk kategori Belum Mandiri. Tabel 2 menyajikan ringkasan IKF Pemerintah Provinsi sejak tahun 2018 hingga 2019 sedangkan perincian IKF disajikan pada Lampiran.

Tabel 2. Ringkasan Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi

Kategori		2018	2019
Sangat Mandiri (IKF $\geq 0,75$)	Jumlah	-	-
	Persentase	-	-
Mandiri ($0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$)	Jumlah	8	8
	Persentase	23,53%	23,53%
Menuju Kemandirian ($0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$)	Jumlah	16	18
	Persentase	47,06%	52,94%
Belum Mandiri (IKF $< 0,25$)	Jumlah	10	8
	Persentase	29,41%	23,53%
Total Entitas		34	34
Rata-rata IKF		0,3591	0,3620
IKF Terendah		0,0628	0,0427
IKF Tertinggi		0,6681	0,7107
Provinsi dengan IKF Dibawah 0,05	Jumlah	0	1
	Persentase	0	2,94%

Seperti ditunjukkan pada Tabel 2, nilai terendah IKF pada tahun 2019 adalah sebesar 0,0427 dan nilai tertinggi adalah sebesar 0,7107. Provinsi dengan IKF tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi dengan IKF terendah adalah Provinsi Papua Barat. Hal ini menunjukkan kesenjangan kemandirian fiskal yang tinggi antar pemerintah Provinsi yang dekat dengan Ibu Kota Negara dengan Provinsi yang jauh dari Ibu Kota Negara. Apabila pada tahun anggaran 2019 belanja daerah Provinsi DKI Jakarta 71,07 persen dibiayai oleh PAD maka pada tahun anggaran yang sama belanja Provinsi Papua Barat hanya sebesar 4,27 persen yang dibiayai oleh PAD. Kondisi tersebut juga menggambarkan adanya kesenjangan pembangunan jika dibandingkan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Papua Barat. Sebagai pembanding, angka rata-rata untuk IKF provinsi TA 2018 dan 2019 adalah 0,36 dan rata-rata angka IKF kabupaten/kota adalah 0,11.

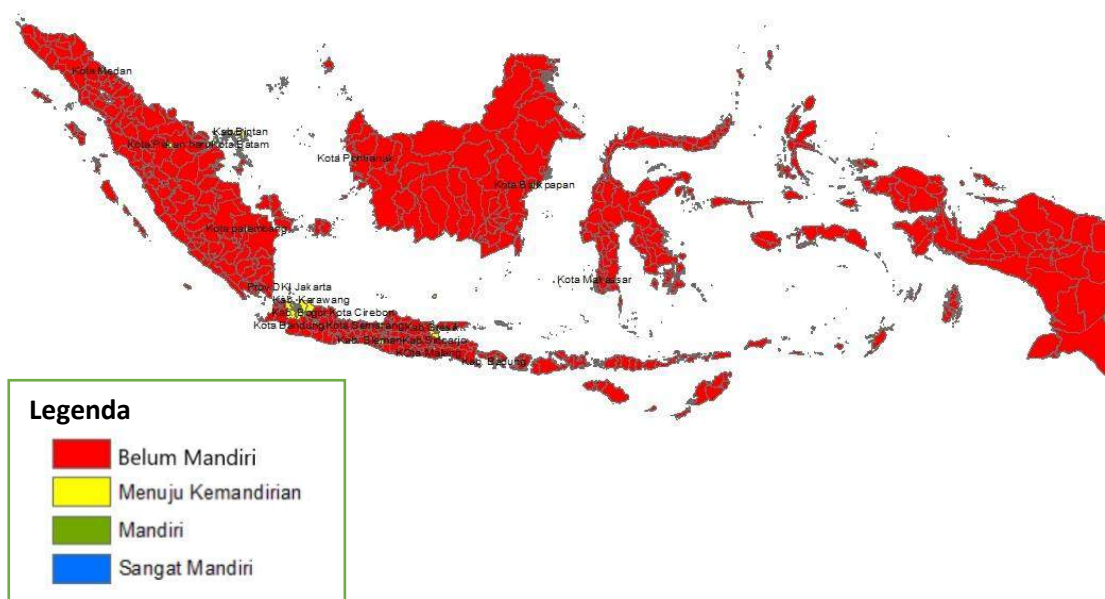
Secara umum, IKF tingkat Provinsi relatif sama antara Tahun 2018 dan 2019. Sebagian besar Pemerintah Provinsi termasuk dalam kategori **Menuju Kemandirian** dan tidak terdapat daerah yang **Sangat Mandiri**. Jumlah Provinsi yang **Belum Mandiri** pada tahun 2018 adalah sepuluh dan turun menjadi delapan pada tahun 2019. Pemerintah Provinsi yang masuk kategori **Menuju Kemandirian** sedikit meningkat dari 16 pada tahun 2018 menjadi 18 pada tahun 2019. Jumlah provinsi yang masuk kategori **Mandiri** sama pada tahun 2018 dan 2019 yaitu sebanyak 8 Provinsi.

Dari sudut pandang geografis, IKF Provinsi di Kawasan Barat Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia. Jika dilihat kondisi IKF per pulau, datanya adalah sebagai berikut:

- Semua Provinsi di Sumatera masuk dalam kategori **Menuju Kemandirian**, kecuali Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang masuk kategori **Belum Mandiri**;
- Semua Provinsi di Jawa dan Bali masuk kategori **Mandiri**, kecuali Provinsi DI Yogyakarta yang masuk kategori **Menuju Kemandirian**;
- Untuk Provinsi di Kalimantan, tiga provinsi masuk kategori **Menuju Kemandirian**, sedangkan dua provinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat masuk kategori **Mandiri**;
- Empat provinsi di Pulau Sulawesi masuk kategori **Menuju Kemandirian** dan dua provinsi yang merupakan daerah otonomi baru masuk kategori **Belum Mandiri**. Hal ini mengindikasikan pemekaran wilayah belum memperhitungkan potensi kemampuan daerah dalam mengupayakan kemandirian fiskal daerah;
- Semua Provinsi di Papua dan Maluku serta NTT masuk kategori **Belum Mandiri**, sedangkan NTB masuk kategori **Menuju Kemandirian**.

3.2 Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota

Salah satu tujuan pemberlakuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, sebagian besar urusan pemerintahan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Hingga laporan revidi kemandirian fiskal ini selesai disusun, jumlah pemerintah kabupaten/kota yang telah menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2018 kepada BPK adalah sebanyak 497 Kabupaten/Kota, sedangkan 11 daerah belum menyerahkan laporan keuangannya. Gambaran umum kemandirian fiskal pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 disajikan pada Gambar 2, sedangkan perincian nilai IKF per Kabupaten/Kota disajikan pada Lampiran.



Gambar 2. Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019

Seperti ditunjukkan oleh Gambar 2, Peta Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota didominasi warna merah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2019 masuk dalam kategori **Belum Mandiri**. Tabel 3 menyajikan ringkasan kemandirian fiskal Kabupaten/Kota untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

Tabel 3. Ringkasan Kemandirian Fiskal Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota

Uraian		2018	2019
Sangat Mandiri (IKF $\geq 0,75$)	Jumlah	1	1
	Persentase	0,20%	0,20%
Mandiri ($0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$)	Jumlah	2	2
	Persentase	0,39%	0,39%
Menuju Kemandirian ($0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$)	Jumlah	34	36
	Persentase	6,69%	7,09%
Belum Mandiri (IKF $< 0,25$)	Jumlah	471	458
	Persentase	92,72%	90,16%
Entitas yang Telah Menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ke BPK	Jumlah	508	497
	Persentase	100,00%	97,83%
Entitas yang Belum Menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ke BPK	Jumlah	0	11
	Persentase	0,00	2,17%
Total Entitas		508	508
Rata-rata IKF		0,1101	0,1131
IKF Terendah		0,0014	0,0031
IKF Tertinggi		0,8405	0,8347
Kabupaten/Kota dengan IKF $< 0,05$	Jumlah	111	102
	Persentase	21,85%	20,08%

Seperti ditunjukkan pada Tabel 3, nilai IKF berkisar antara 0,0014 hingga 0,8405 pada tahun 2018 dan 0,0031 hingga 0,8347 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang sangat besar dalam kemandirian fiskal daerah dimana terdapat daerah yang Sangat Mandiri karena sebagian besar belanja daerah (83,47 persen) dibiayai dengan PAD, tetapi di lain pihak terdapat daerah yang masih Belum Mandiri, karena PAD hanya cukup untuk membiayai sebagian kecil (0,31 persen) belanja daerah. Kesenjangan ini harus menjadi perhatian semua pihak, agar daerah yang Belum Mandiri dapat didorong untuk menjadi daerah yang masuk kategori Menuju Kemandirian.

Walaupun terdapat sedikit perbaikan kondisi kemandirian fiskal Kabupaten/Kota, sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota masih tergolong **Belum Mandiri**. Pada tahun 2018, sebanyak 471 dari 508 (92,72 persen) Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk kategori **Belum Mandiri** dengan IKF dibawah 0,25. Jumlah Kabupaten/Kota yang **Belum Mandiri**

sedikit menurun pada tahun 2019 menjadi 458 dari 508 Kabupaten/Kota (90,16 persen). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Yang patut dicermati dari daerah yang masuk kategori Belum Mandiri tersebut adalah terdapat sedikitnya 102 daerah dengan nilai IKF dibawah 0,05. Hal menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut sangat tergantung dengan dana transfer, karena PAD hanya cukup untuk membiayai 5 persen belanja daerah.

Jumlah Kabupaten/Kota yang bergerak **Menuju Kemandirian** sedikit meningkat pada tahun 2019 apabila dibandingkan tahun 2018. Apabila pada tahun 2018 terdapat 34 (6,69 persen) daerah dengan IKF antara 0,25 hingga 0,50, maka pada tahun 2019 terdapat 36 (7,09 persen) daerah dengan IKF antara 0,25 hingga 0,50. Dengan demikian terdapat peningkatan sebanyak 2 entitas yang meningkat predikatnya dari **Belum Mandiri** menjadi **Menuju Kemandirian**.

Walaupun jumlah Kabupaten/Kota dengan predikat **Belum Mandiri** menurun dan jumlah Kabupaten/Kota dengan predikat **Menuju Kemandirian** meningkat, jumlah Kabupaten/Kota dengan predikat **Mandiri** dan **Sangat Mandiri** tidak mengalami peningkatan. Hanya terdapat dua daerah dengan predikat **Mandiri** pada tahun 2018 dan 2019 yaitu Kota Surabaya dan Kota Tangerang Selatan. Kota Surabaya telah masuk kategori Mandiri sejak tahun 2013, sedangkan Kota Tangerang Selatan telah mencapai kategori Mandiri sejak tahun 2016 hingga sekarang. Analisis IKF menunjukan hanya terdapat satu daerah dengan predikat **Sangat Mandiri**, yaitu Kabupaten Badung. Kabupaten Badung telah masuk kategori daerah **Sangat Mandiri** sejak tahun 2013 dengan nilai IKF 0,7714. Pada Tahun 2018, IKF Kabupaten Badung sebesar 0,8405 dan sedikit menurun menjadi 0,8347 pada tahun 2019. Dengan demikian, 83,47 persen Belanja Daerah Kabupaten Badung dibiayai dari PAD Tabel 4 menyajikan daerah dengan predikat IKF Mandiri dan Sangat Mandiri.

Tabel 4. Kabupaten/Kota dengan predikat IKF Mandiri dan Sangat Mandiri

Pemerintah Daerah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Badung	0,7714	0,7869	0,8036	0,8233	0,8322	0,8405	0,8347
Kota Surabaya	0,5332	0,5464	0,6097	0,5992	0,6201	0,6083	0,6140
Kota Tangerang Selatan	0,3610	0,4462	0,4720	0,5053	0,5101	0,5050	0,5277

3.3 Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali

Salah satu hal yang mendorong munculnya otonomi daerah adalah ketimpangan pembangunan antara daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan daerah di luar Jawa dan Bali. Kondisi tersebut ternyata masih tercermin dalam kemandirian fiskal daerah setelah lebih dari dua puluh tahun otonomi daerah diberlakukan. Satu-satunya daerah yang masuk kategori **Sangat Mandiri** berada di Pulau Bali dan dua daerah yang masuk kategori **Mandiri** berada di Pulau Jawa. Pada tahun 2019, jumlah daerah di Pulau Jawa dan Bali yang masuk kategori **Menuju Kemandirian** sebanyak 25 entitas dan atau meningkat dua entitas apabila dibandingkan tahun 2018. Daerah yang masuk dalam kategori **Belum Mandiri** pada tahun 2019 masih cukup banyak, yaitu 94 entitas (77,05 persen), tetapi tidak terdapat daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan IKF dibawah 0,05. Tabel 5 menyajikan ringkasan Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali.

Tabel 5. Ringkasan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali

Kategori		2018	2019
Sangat Mandiri (IKF \geq 0,75)	Jumlah	1	1
	Persentase	0,82%	0,82%
Mandiri (0,50 \leq IKF < 0,75)	Jumlah	2	2
	Persentase	1,64%	1,64%
Menuju Kemandirian (0,25 \leq IKF < 0,50)	Jumlah	23	25
	Persentase	18,85%	20,49%
Belum Mandiri (IKF < 0,25)	Jumlah	96	94
	Persentase	78,69%	77,05%
Entitas yang Belum Menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ke BPK	Jumlah	0	0
	Persentase	0,00	0,00
Total Entitas		122	122
IKF Terendah		0,0698	0,0752
IKF Tertinggi		0,8405	0,8347
Kabupaten/Kota dengan IKF Dibawah 0,05	Jumlah	0	0
	Persentase	0,00%	0,00%

3.4 Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera

Hasil analisis kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Sumatera menunjukkan tidak terdapat perubahan kemandirian fiskal daerah dari tahun 2018 ke tahun 2019. Sebagian besar Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera masuk dalam kategori **Belum Mandiri**. Pada Tahun 2018 dan 2019 terdapat sebanyak 147 daerah (95,45% persen) masuk dalam kategori **Belum Mandiri**. Demikian juga dengan jumlah daerah yang masuk **Menuju Kemandirian**, tetap pada angka 7 entitas (4,55 persen) pada tahun 2018 dan 2019. Di Pulau Sumatera juga masih banyak daerah dengan kemandirian fiskal yang sangat rendah atau dibawah 0,05 yaitu sebanyak 23 daerah pada tahun 2018 dan turun menjadi 22 daerah pada tahun 2019. Tabel 6 menyajikan ringkasan kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Tabel 6. Ringkasan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera

Kategori		2018	2019
Sangat Mandiri (IKF \geq 0,75)	Jumlah	-	-
	Persentase	0,00%	0,00%
Mandiri (0,50 \leq IKF < 0,75)	Jumlah	-	-
	Persentase	0,00%	0,00%
Menuju Kemandirian (0,25 \leq IKF < 0,50)	Jumlah	7	7
	Persentase	4,55%	4,55%
Belum Mandiri (IKF < 0,25)	Jumlah	147	147
	Persentase	95,45%	95,45%
Entitas yang Belum Menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ke BPK	Jumlah	0	0
	Persentase	0,00%	0,00%
Total Entitas		154	154
IKF Terendah		0,0168	0,0196
IKF Tertinggi		0,4596	0,4549
Kabupaten/Kota dengan IKF Dibawah 0,05	Jumlah	22	22
	Persentase	14,94%	14,29%

3.5 Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi

Hasil analisis kemandirian fiskal Pemerintah Daerah menunjukkan kemandirian fiskal daerah di Pulau Sulawesi masih rendah. Tidak terdapat daerah yang masuk kategori Mandiri atau Sangat Mandiri dan hanya terdapat satu kota dengan kategori **Menuju Kemandirian** yaitu Kota Makassar. Pada tahun 2018, sebanyak 80 dari 81 Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi masuk kategori **Belum Mandiri** dan pada tahun 2019 sebanyak 77 dari 78 daerah yang telah memasukkan LKPD ke BPK masuk kategori **Belum Mandiri**. Hingga tanggal berakhirnya Reviu Kemandirian Fiskal ini dibuat, masih terdapat tiga daerah di Pulau Sulawesi yang belum menyerahkan LKPD, sehingga nilai IKF daerah tersebut tidak dapat dihitung. Sedangkan daerah dengan IKF dibawah 0,05, terdapat peningkatan dari 23 Kabupaten/Kota pada Tahun 2018 menjadi 26 Kabupaten/Kota pada tahun 2019. Tabel 7 menyajikan ringkasan kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi.

Tabel 7. Ringkasan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi

Kategori		2018	2019
Sangat Mandiri (IKF \geq 0,75)	Jumlah	-	-
	Persentase	0,00%	0,00%
Mandiri ($0,50 \leq$ IKF $<$ 0,75)	Jumlah	-	-
	Persentase	0,00%	0,00%
Menuju Kemandirian ($0,25 \leq$ IKF $<$ 0,50)	Jumlah	1	1
	Persentase	1,23%	1,23%
Belum Mandiri (IKF $<$ 0,25)	Jumlah	80	77
	Persentase	98,77%	95,06%
Entitas yang Belum Menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ke BPK	Jumlah	0	3
	Persentase	0,00%	3,70%
Total Entitas		81	81
IKF Terendah		0,0201	0,0202
IKF Tertinggi		0,3458	0,3555
Kabupaten/Kota dengan IKF Dibawah 0,05	Jumlah	23	26
	Persentase	28,40%	32,10%

3.6 Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di NTT dan NTB

Semua entitas di NTB dan NTT telah menyerahkan LKPD TA 2019 ke BPK. Hasil analisis kemandirian fiskal atas LKPD Kabupaten/Kota yang berada di NTB dan NTT menunjukkan sebagian besar Kabupaten/Kota di NTB dan NTT masuk dalam kategori **Belum Mandiri**. Pada Tahun 2018, hanya satu daerah di NTB dan NTT masuk kategori **Menuju Kemandirian**, yaitu Kota Mataram dan sebanyak 31 daerah lainnya masuk kategori **Belum Mandiri**. Kondisi tersebut tidak berubah pada tahun 2019. Daerah dengan IKF dibawah 0,05 justru mengalami peningkatan dari lima di tahun 2018 menjadi delapan pada tahun 2019. Tabel 8 menyajikan ringkasan kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di NTB dan NTT.

Tabel 8. Ringkasan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di NTB dan NTT

Kategori		2018	2019
Sangat Mandiri (IKF \geq 0,75)	Jumlah	-	-
	Persentase	0,00%	0,00%
Mandiri (0,50 \leq IKF < 0,75)	Jumlah	-	-
	Persentase	0,00%	0,00%
Menuju Kemandirian (0,25 \leq IKF < 0,50)	Jumlah	1	1
	Persentase	3,13%	3,13%
Belum Mandiri (IKF < 0,25)	Jumlah	31	31
	Persentase	96,88%	96,88%
Entitas yang Belum Menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ke BPK	Jumlah	0	0
	Persentase	0,00%	0,00%
Total Entitas		32	32
IKF Minimal		0,0358	0,0387
IKF Maksimal		0,2530	0,2556
Kabupaten/Kota dengan IKF Dibawah 0,05	Jumlah	5	8
	Persentase	15,63%	25,00%

3.7 Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan

Dari 56 Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan, masih terdapat satu Kabupaten yang belum menyerahkan LKPD ke BPK. Hasil analisis atas LKPD yang telah diserahkan ke BPK menunjukkan bahwa kondisi kemandirian fiskal daerah di Pulau Kalimantan pada tahun 2018 dan 2019 adalah sama. Sebagian besar Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan masuk dalam kategori **Belum Mandiri**. Pada tahun 2018 dan 2019 terdapat dua daerah yang masuk kategori **Menuju Kemandirian** dan sisanya masuk kategori **Belum Mandiri**. Tabel 9 menyajikan ringkasan kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan.

Tabel 9. Ringkasan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan

Kategori		2018	2019
Sangat Mandiri (IKF $\geq 0,75$)	Jumlah	-	-
	Persentase	0,00%	0,00%
Mandiri ($0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$)	Jumlah	-	-
	Persentase	0,00%	0,00%
Menuju Kemandirian ($0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$)	Jumlah	2	2
	Persentase	3,57%	3,57%
Belum Mandiri (IKF $< 0,25$)	Jumlah	54	53
	Persentase	96,43%	94,64%
Entitas yang Belum Menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ke BPK	Jumlah	0	1
	Persentase	0,00%	1,79%
Total Entitas		56	56
IKF Terendah		0,0140	0,0122
IKF Tertinggi		0,2900	0,3094
Kabupaten/Kota dengan IKF Dibawah 0,05	Jumlah	13	6
	Persentase	23,21%	10,91%

3.8 Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku dan Papua

Dari 63 Kabupaten/Kota di Maluku dan Papua, masih terdapat tujuh Kabupaten yang belum menyerahkan LKPD ke BPK. Hasil analisis kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Maluku dan Papua menunjukkan seluruh Kabupaten/Kota di Maluku dan Papua masuk dalam kategori **Belum Mandiri**. Selain Belum Mandiri, sebagian besar Kabupaten/Kota di Maluku dan Papua memiliki IKF yang sangat rendah, yaitu dibawah 0,05. Pada tahun 2018, terdapat 53 dari 63 daerah dengan IKF yang sangat rendah dan pada tahun 2019 kondisi tersebut tidak banyak berubah. Dari 56 Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku dan Papua yang telah menyerahkan LKPD TA 2019 ke BPK,

semuanya masuk kategori Belum Mandiri. Tabel 10 menyajikan ringkasan kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Maluku dan Papua.

Tabel 10. Ringkasan Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Maluku dan Papua

Kategori		2018	2019
Sangat Mandiri (IKF \geq 0,75)	Jumlah	0	0
	Persentase	0,00%	0,00%
Mandiri ($0,50 \leq$ IKF $<$ 0,75)	Jumlah	0	0
	Persentase	0,00%	0,00%
Menuju Kemandirian ($0,25 \leq$ IKF $<$ 0,50)	Jumlah	0	0
	Persentase	0,00%	0,00%
Belum Mandiri (IKF $<$ 0,25)	Jumlah	63	56
	Persentase	100%	88,89%
Entitas yang Belum Menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ke BPK	Jumlah	0	7
	Persentase	0,00%	11,11%
Total Entitas		63	63
IKF Terendah		0,0014	0,0031
IKF Tertinggi		0,1929	0,1816
Kabupaten/Kota dengan IKF Dibawah 0,05	Jumlah	47	40
	Persentase	74,60%	71,43%

BAB IV: KESIMPULAN

Pemberian otonomi daerah yang diikuti dengan desentralisasi seharusnya dapat mendorong daerah untuk mencapai kemandirian fiskal. Daerah diharapkan dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pembangunan daerah. Reviu atas kemandirian fiskal daerah merupakan salah satu bentuk evaluasi atas transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. BPK berinisiatif untuk melakukan perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebagai bagian dari reviu kemandirian fiskal. Perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal daerah dilakukan dengan menggunakan formula Hunter (1977) yang telah disesuaikan. Selanjutnya, Indeks Kemandirian Fiskal daerah diklasifikasikan sesuai kategori yang disusun oleh Sampurna (2019).

Hasil analisis Indeks Kemandirian Fiskal menunjukkan:

- a. **Kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah yang sangat tinggi.** Hal ini diindikasikan dari angka indeks kemandirian fiskal TA 2019 dengan perbedaan yang sangat mencolok untuk provinsi yang tertinggi (DKI Jakarta) sebesar 0,7107 dengan provinsi yang terendah (Papua Barat) dengan indeks senilai 0,0427. Artinya belanja daerah Provinsi DKI Jakarta 71,07 persen dibiayai oleh PAD maka pada saat yang sama belanja Provinsi Papua Barat hanya sebesar 4,27 persen yang dibiayai oleh PAD. Kondisi tersebut juga menggambarkan adanya kesenjangan pembangunan jika dibandingkan antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Papua Barat. Kesenjangan kemandirian fiskal juga terjadi di level kabupaten/kota di Indonesia. Dari data diketahui, Kabupaten Badung di Bali dengan nilai indeks 0,8347 dapat membiayai 83,47 persen dari belanja daerah dari PAD. Sedangkan Kabupaten Deiyai di Papua dengan nilai indeks 0,0031, artinya PAD di kabupaten tersebut hanya dapat membiayai 0,31 persen dari belanja daerah. Sebagai pembandingan, angka rata-rata untuk IKF provinsi TA 2018 dan 2019 adalah 0,36 dan rata-rata angka IKF kabupaten/kota adalah 0,11. Atau dengan kata lain, rata-rata provinsi dapat membiayai 36 persen dari belanja daerah sedangkan rata-rata kabupaten/kota hanya dapat membiayai 11 persen dari belanja daerahnya.
- b. **Sebagian besar Pemerintah Daerah belum mandiri.** Hal ini diindikasikan dengan hasil perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal berikut ini.
 - Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi yang **Belum Mandiri** sebanyak 10 dari 34 Provinsi atau sekitar 29,41 persen dan turun menjadi 8 Provinsi dari 34

atau sekitar 23,53 persen Provinsi pada Tahun Anggaran 2019. Adapun jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang Belum Mandiri sebanyak 471 dari 508 Kabupaten/Kota atau sekitar 92,71 persen pada Tahun Anggaran 2018 dan turun menjadi 458 dari 497 Kabupaten/Kota atau sekitar 92,15 persen pada Tahun Anggaran 2019. Patut dicermati dari daerah yang masuk kategori kabupaten/kota yang Belum Mandiri tersebut adalah terdapat sedikitnya 102 daerah dengan nilai IKF dibawah 0,05. Hal menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut sangat tergantung dengan dana transfer, karena PAD hanya cukup untuk membiayai 5 persen belanja daerah.

- Berdasarkan jumlah daerah yang masuk kategori **Menuju Kemandirian**, terdapat 16 dari 34 Provinsi atau sekitar 47,06 persen yang masuk kategori Menuju Kemandirian pada Tahun Anggaran 2018 dan meningkat menjadi 18 dari 34 Provinsi atau sekitar 52,94 persen pada Tahun Anggaran 2019. Sedangkan jumlah Kabupaten/Kota yang masuk klasifikasi Menuju Kemandirian pada Tahun Anggaran 2018 sebanyak 34 dari 508 Kabupaten/Kota atau sekitar 6,69 persen dan meningkat menjadi 36 dari 497 atau sekitar 7,24 persen pada Tahun Anggaran 2019.
- Dilihat dari jumlah daerah yang telah **Mandiri**, maka jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Mandiri tidak mengalami perubahan pada Tahun 2018 dan 2019 yaitu 8 Provinsi dan 2 Kota.
- Terakhir, analisis menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 hanya terdapat satu daerah dengan klasifikasi **Sangat Mandiri**, yaitu Kabupaten Badung dan tidak terdapat Pemerintah Provinsi yang Sangat Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Di Liddo, G., Longobardi, E., & Porcelli, F. (2016). Measuring horizontal fiscal imbalance: the case of Italian municipalities. *Local Government Studies*, 42(3), 385–419. <https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1150836>
- Firdausy, C. M. (2017). Prolog: Peningkatan PAD dan Pembangunan Nasional. In C. M. Firdausy (Ed.), *Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hunter, J. S. H. (1977). *Federalism and fiscal balance: a comparative study*. Australian National University Press for Research on Federal Fiscal Relations.
- Lee, Y. (2004). Adequacy of Korea's Tax Assignment: A Fiscal Federalism Approach. *International Review of Public Administration*, 9(2), 139–148. <https://doi.org/10.1080/12294659.2005.10805055>
- Sampurna, A. F. (2018). *Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal*. Makalah Disajikan dalam Rapat Kerja Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (AKN V dan AKN VI) BPK di Banyuwangi Tanggal 18 September 2018.
- Shah, A. (1994). *The reform of intergovernmental fiscal relations in developing and emerging market economies*. The World Bank.

LAMPIRAN

Lampiran A. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2013-2019

No	Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Nangroe Aceh Darusallam	0,1242	0,1492	0,1688	0,1666	0,1586	0,1635	0,1715 *
2	Sumatera Utara	0,5530	0,5683	0,5759	0,4746	0,4322	0,4439	0,4405 *
3	Sumatera Barat	0,4340	0,4756	0,4631	0,4247	0,3518	0,3616	0,3609 *
4	Riau	0,3897	0,3990	0,5031	0,4480	0,4252	0,4292	0,4088 *
5	Jambi	0,3686	0,4048	0,3966	0,3634	0,3665	0,3754	0,3609 *
6	Sumatera Selatan	0,3697	0,3875	0,4231	0,3868	0,3699	0,3859	0,3792 *
7	Bengkulu	0,3096	0,3384	0,3216	0,3106	0,2869	0,3059	0,2832 *
8	Lampung	0,4540	0,5025	0,4694	0,4239	0,4037	0,4035	0,4086 *
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,3242	0,3274	0,3030	0,2945	0,3153	0,3326	0,3069 *
10	Kepulauan Riau	0,3193	0,3666	0,4030	0,3703	0,3366	0,3488	0,3330 *
11	DKI Jakarta	0,6795	0,7136	0,7611	0,6816	0,6669	0,6681	0,7107 *
12	Jawa Barat	0,6425	0,6740	0,6678	0,6154	0,5622	0,5791	0,5895 *
13	Jawa Tengah	0,6155	0,6542	0,6480	0,5879	0,5294	0,5551	0,5583 *
14	D.I. Yogyakarta	0,4708	0,4665	0,4686	0,4293	0,3642	0,3749	0,3654
15	Jawa Timur	0,6665	0,6953	0,6929	0,6337	0,5794	0,5802	0,5767 *
16	Banten	0,6611	0,6931	0,6786	0,6311	0,5931	0,6133	0,6269
17	Bali	0,6157	0,6380	0,6122	0,5794	0,5672	0,5941	0,6054 *
18	Nusa Tenggara Barat	0,3606	0,3997	0,3980	0,3443	0,3314	0,3360	0,3477 *
19	Nusa Tenggara Timur	0,2191	0,2738	0,2661	0,2568	0,2229	0,2291	0,2351 *
20	Kalimantan Barat	0,4130	0,4359	0,4180	0,3703	0,3604	0,3878	0,3874 *

No	Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21	Kalimantan Tengah	0,3894	0,4006	0,3545	0,3264	0,3275	0,3455	0,3559 *
22	Kalimantan Selatan	0,3894	0,6048	0,5656	0,4791	0,5066	0,5396	0,5178 *
23	Prov. Kalimantan Timur	0,5060	0,5904	0,5230	0,5046	0,5625	0,5436	0,5568 *
24	Kalimantan Utara	0,5060	0,0078	0,2562	0,2177	0,2162	0,2372	0,2513 *
25	Sulawesi Utara	0,3832	0,4040	0,4007	0,3400	0,3073	0,3317	0,3217 *
26	Sulawesi Tengah	0,3105	0,3376	0,3119	0,2957	0,2634	0,2619	0,2642 *
27	Sulawesi Selatan	0,5147	0,5267	0,5255	0,4816	0,4063	0,4267	0,4323 *
28	Sulawesi Tenggara	0,2477	0,2724	0,2636	0,2685	0,2281	0,2388	0,2709 *
29	Gorontalo	0,2039	0,2332	0,2084	0,1964	0,1964	0,2136	0,2223 *
30	Sulawesi Barat	0,1435	0,1795	0,1856	0,1566	0,1538	0,1657	0,1696 *
31	Maluku	0,1969	0,2334	0,1856	0,1830	0,1529	0,1515	0,1547 *
32	Maluku Utara	0,1261	0,2334	0,1311	0,1385	0,1439	0,1440	0,1587 *
33	Papua	0,0755	0,0882	0,0773	0,0811	0,0781	0,0779	0,1330 *
34	Papua Barat	0,0419	0,0532	0,0553	0,0503	0,0666	0,0628	0,0427 *
Rata-Rata		0,3831	0,4038	0,4024	0,3680	0,3480	0,3591	0,3620

Catatan

1. Untuk menghitung IKF digunakan Total Pendapatan sebagai *proxy* Belanja.
2. * IKF Tahun Anggaran 2019 dihitung berdasarkan LKPD yang belum diperiksa BPK (*unaudited*), sedangkan yang tidak bertanda berarti sudah diperiksa (*audited*).

**Lampiran B. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2013-2019**

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	ACEH							
1	Kab. Aceh Barat	0,0651	0,1151	0,1189	0,1086	0,1042	0,1203	0,1079*
3	Kab. Aceh Barat Daya	0,0587	0,0792	0,0675	0,0781	0,0785	0,0947	0,0913*
4	Kab. Aceh Besar	0,0816	0,0979	0,0925	0,0764	0,0637	0,0963	0,0927*
5	Kab. Aceh Jaya	0,0432	0,0542	0,0449	0,0467	0,0525	0,0709	0,0776*
6	Kab. Aceh Selatan	0,0483	0,0780	0,0715	0,0863	0,0744	0,1116	0,0963
7	Kab. Aceh Singkil	0,0379	0,0489	0,0463	0,0467	0,0494	0,0602	0,0504*
8	Kab. Aceh Tamiang	0,0636	0,1052	0,0901	0,0859	0,0645	0,1197	0,1245
9	Kab. Aceh Tengah	0,0971	0,1268	0,1151	0,1020	0,0930	0,1190	0,1375*
10	Kab. Aceh Tenggara	0,0402	0,0651	0,0487	0,0424	0,0256	0,0727	0,0874*
11	Kab. Aceh Timur	0,0448	0,0678	0,0645	0,0547	0,0552	0,1053	0,0955*
12	Kab. Aceh Utara	0,0669	0,1017	0,0978	0,1608	0,0556	0,1029	0,1075*
13	Kab. Bener Meriah	0,0360	0,0611	0,0707	0,0673	0,0633	0,0773	0,0797*
14	Kab. Bireuen	0,0900	0,1304	0,1043	0,1013	0,0915	0,1024	0,0806*
15	Kab. Gayo Lues	0,0387	0,0394	0,0436	0,0434	0,0494	0,0567	0,0538*
16	Kab. Nagan Raya	0,0593	0,0732	0,0777	0,0907	0,0491	0,0989	0,0779*
17	Kab. Pidie	0,0757	0,1276	0,1217	0,1210	0,1039	0,1224	0,1147*
18	Kab. Pidie Jaya	0,0278	0,0440	0,0498	0,0459	0,0248	0,0673	0,0657*
19	Kab. Simeulue	0,0315	0,0534	0,0626	0,0556	0,0485	0,0763	0,0829*
20	Kota Banda Aceh	0,1391	0,1515	0,1724	0,1956	0,1982	0,2168	0,1935*
21	Kota Langsa	0,1003	0,1509	0,1383	0,1233	0,1011	0,1504	0,1267
22	Kota Lhokseumawe	0,0563	0,0634	0,0677	0,0620	0,0699	0,0876	0,0711*
23	Kota Sabang	0,0641	0,0813	0,0901	0,0747	0,0852	0,0927	0,0891*
24	Kota Subulussalam	0,0232	0,0519	0,0547	0,0515	0,0589	0,0691	0,0713*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II	SUMATERA UTARA							
1	Kab. Asahan	0,0447	0,0615	0,0698	0,0740	0,0831	0,0885	0,0868
2	Kab. Batu Bara	0,0353	0,0522	0,0561	0,0544	0,0629	0,0611	0,1083*
3	Kab. Dairi	0,0416	0,0698	0,0661	0,0640	0,0696	0,0684	0,0637*
4	Kab. Deli Serdang	0,1566	0,1771	0,1852	0,1841	0,2096	0,2169	0,2299*
5	Kab. Humbang Hasundutan	0,0281	0,0409	0,0455	0,0472	0,0526	0,1010	0,0732
6	Kab. Karo	0,0510	0,0721	0,0596	0,0686	0,0768	0,1065	0,0826*
7	Kab. Labuhanbatu	0,0602	0,1185	0,0997	0,0986	0,1071	0,1333	0,1330*
8	Kab. Labuhanbatu Selatan	0,0431	0,0534	0,0442	0,0481	0,0565	0,0588	0,0779
9	Kab. Labuhan Batu Utara	0,0340	0,0417	0,0404	0,0432	0,0502	0,0552	0,0648*
10	Kab. Langkat	0,0421	0,0641	0,0607	0,0599	0,0605	0,0614	0,0709*
11	Kab. Mandailing Natal	0,0547	0,0424	0,0525	0,0494	0,0527	0,0557	0,0588*
12	Kab. Nias	0,0966	0,1262	0,1026	0,1012	0,0759	0,0845	0,1115*
13	Kab. Nias Barat	0,0221	0,0276	0,0311	0,0294	0,0279	0,0566	0,0247*
14	Kab. Nias Selatan	0,0512	0,0199	0,0185	0,0161	0,0164	0,0168	0,0196*
15	Kab. Nias Utara	0,0216	0,0224	0,0282	0,0351	0,0291	0,0671	0,0655*
16	Kab. Padang Lawas	0,0429	0,0487	0,0484	0,0394	0,0454	0,0461	0,0459
17	Kab. Padang Lawas Utara	0,0255	0,0367	0,0361	0,0290	0,0383	0,0699	0,0358*
18	Kab. Pakpak Bharat	0,0233	0,0332	0,0336	0,0365	0,0408	0,0375	0,0574*
19	Kab. Samosir	0,0503	0,0748	0,0505	0,0504	0,0600	0,0591	0,0741
20	Kab. Serdang Begadai	0,0510	0,0688	0,0631	0,0754	0,0748	0,1244	0,1228
21	Kab. Simalungun	0,0667	0,0586	0,0579	0,0598	0,0658	0,0748	0,0810*
22	Kab. Tapanuli Selatan	0,0854	0,1073	0,1004	0,0634	0,0840	0,1023	0,1139
23	Kab. Tapanuli Tengah	0,0266	0,0657	0,0664	0,0671	0,0665	0,0630	0,0733*
24	Kab. Tapanuli Utara	0,0445	0,0729	0,0741	0,0791	0,0878	0,0819	0,0855

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
25	Kab. Toba Samosir	0,0276	0,0342	0,0360	0,0555	0,0208	0,0526	0,0633
26	Kota Binjai	0,0691	0,0895	0,0928	0,1009	0,1241	0,1508	0,1196*
27	Kota Gunungsitoli	0,0230	0,0375	0,0391	0,0413	0,0431	0,0419	0,0441*
28	Kota Medan	0,3681	0,3425	0,3498	0,3564	0,3637	0,3847	0,3315
29	Kota Padangsidempuan	0,0560	0,0833	0,0877	0,0960	0,0966	0,0928	0,0987*
30	Kota Pematangsiantar	0,0839	0,1088	0,1072	0,0938	0,0930	0,1400	0,1244
31	Kota Sibolga	0,0637	0,1015	0,0992	0,1099	0,1442	0,1305	0,1135
32	Kota Tanjungbalai	0,0588	0,0996	0,0996	0,0981	0,1076	0,1171	0,0984*
33	Kota Tebing Tinggi	0,0892	0,1185	0,1235	0,1329	0,1317	0,1589	0,1475
III	SUMATERA BARAT							
1	Kab. Agam	0,0497	0,0702	0,0707	0,0760	0,0722	0,0717	0,0817*
2	Kab. Dharmasraya	0,0553	0,0768	0,0714	0,0645	0,0739	0,0911	0,0774*
3	Kab. Kep. Mentawai	0,0539	0,0524	0,0516	0,0461	0,0564	0,0497	0,0396*
4	Kab. Lima Puluh Kota	0,0372	0,0526	0,0553	0,0577	0,0552	0,0584	0,0637*
5	Kab. Padang Pariaman	0,0445	0,0587	0,0611	0,0538	0,0583	0,0645	0,0671*
6	Kab. Pasaman	0,0670	0,0896	0,0896	0,0915	0,1004	0,1012	0,0952*
7	Kab. Pasaman Barat	0,0493	0,0794	0,0716	0,0853	0,0958	0,0921	0,0860*
8	Kab. Pesisir Selatan	0,0465	0,0738	0,0776	0,0738	0,0725	0,0810	0,0795*
9	Kab. Sijunjung	0,0577	0,0725	0,0785	0,0868	0,0762	0,0840	0,0840*
10	Kab. Solok	0,0367	0,0521	0,0505	0,0521	0,0511	0,0587	0,0595*
11	Kab. Solok Selatan	0,0431	0,0513	0,0557	0,0659	0,0681	0,0762	0,0744*
12	Kab. Tanah Datar	0,0715	0,0992	0,0973	0,1001	0,1056	0,0942	0,0969*
13	Kota Bukittinggi	0,1047	0,1035	0,1113	0,1102	0,1318	0,1465	0,1524*
14	Kota Padang	0,1393	0,1650	0,1902	0,1958	0,2154	0,2259	0,2324

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
15	Kota Padang Panjang	0,0995	0,1086	0,1327	0,1279	0,1370	0,1440	0,1337*
16	Kota Pariaman	0,0438	0,0483	0,0521	0,0478	0,0483	0,0514	0,0544
17	Kota Payakumbuh	0,0998	0,1092	0,1430	0,1219	0,1340	0,1331	0,1306*
18	Kota Sawahlunto	0,0866	0,0995	0,0972	0,0907	0,0939	0,0805	0,0883*
19	Kota Solok	0,0556	0,0603	0,0698	0,0734	0,0701	0,0720	0,0677*
IV	RIAUI							
1	Kab. Bengkalis	0,0584	0,0636	0,0964	0,0691	0,0597	0,0950	0,0600*
2	Kab. Indragiri Hilir	0,0521	0,0585	0,0780	0,0721	0,1188	0,0837	0,0760*
3	Kab. Indragiri Hulu	0,0517	0,0683	0,0935	0,0707	0,0681	0,0751	0,0714*
4	Kab. Kampar	0,0696	0,0706	0,1011	0,0756	0,0959	0,0986	0,0959*
5	Kab. Kepulauan Meranti	0,0383	0,0533	0,0615	0,0510	0,0621	0,0639	0,0671
6	Kab. Kuantan Singingi	0,0376	0,0432	0,0566	0,0507	0,0482	0,0559	0,0517*
7	Kab. Pelalawan	0,0534	0,0581	0,0832	0,0762	0,0903	0,0931	0,0948*
8	Kab. Rokan Hilir	0,0424	0,0360	0,0679	0,1116	0,0656	0,0618	0,0553*
9	Kab. Rokan Hulu	0,0434	0,0626	0,0659	0,0663	0,0766	0,0543	0,0922*
10	Kab. Siak	0,1533	0,1171	0,1943	0,1003	0,1255	0,1199	0,1188*
11	Kota Dumai	0,1447	0,1216	0,1685	0,1815	0,2240	0,2282	0,2154*
12	Kota Pekanbaru	0,1859	0,1859	0,2382	0,2307	0,2755	0,2652	0,2997*
V	JAMBI							
1	Kab. Batang Hari	0,0534	0,0746	0,0753	0,0684	0,0750	0,0824	0,0698*
2	Kab. Bungo	0,0852	0,1033	0,0995	0,0990	0,1083	0,1061	0,1040*
3	Kab. Kerinci	0,0455	0,0639	0,0724	0,0764	0,0714	0,0669	0,0661*
4	Kab. Merangin	0,0480	0,0647	0,0664	0,0573	0,0648	0,0669	0,0704*
5	Kab. Muaro Jambi	0,0507	0,0621	0,0594	0,0511	0,0642	0,0685	0,0670*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6	Kab. Sarolangun	0,0380	0,0682	0,0863	0,0841	0,0721	0,0969	0,0715*
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	0,0496	0,0666	0,0731	0,0693	0,0767	0,0736	0,0732*
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	0,0324	0,0372	0,0418	0,0403	0,0453	0,0454	0,0451*
9	Kab. Tebo	0,0433	0,0644	0,0703	0,0615	0,0674	0,0692	0,0719*
10	Kota Jambi	0,1280	0,1866	0,1903	0,1830	0,2244	0,2086	0,2315*
11	Kota Sungai Penuh	0,0435	0,0555	0,0579	0,0518	0,0458	0,0470	0,0425*
VI	SUMATERA SELATAN							
1	Kab. Banyuasin	0,0489	0,0583	0,0559	0,0534	0,0628	0,0676	0,0820*
2	Kab. Empat Lawang	0,0365	0,0418	0,0372	0,0279	0,0761	0,0329	0,0394*
3	Kab. Lahat	0,0637	0,0826	0,1144	0,1072	0,0644	0,0587	0,0620*
4	Kab. Muara Enim	0,0678	0,0771	0,0902	0,0737	0,0898	0,0920	0,0985*
5	Kab. Musi Banyuasin	0,0367	0,0550	0,0894	0,0640	0,0792	0,0696	0,0684
6	Kab. Musi Rawas	0,0498	0,1053	0,0745	0,0598	0,0978	0,0604	0,0670
7	Kab. Musi Rawas Utara	na	0,0339	0,0473	0,0395	0,0411	0,0327	0,0382*
8	Kab. Ogan Ilir	0,0222	0,0458	0,0399	0,0883	0,0313	0,0391	0,0528*
9	Kab. Ogan Komering Ilir	0,0487	0,0923	0,0667	0,0551	0,1051	0,1061	0,0791*
10	Kab. Ogan Komering Ulu	0,0456	0,0732	0,0954	0,0734	0,0892	0,1109	0,0902
11	Kab. OKU Selatan	0,0279	0,0377	0,0409	0,0314	0,0349	0,0339	0,0414*
12	Kab. OKU Timur	0,0426	0,0515	0,0495	0,0456	0,0486	0,0524	0,0502*
13	Kab. PALI	na	0,0195	0,0363	0,0327	0,0282	0,0607	0,0499*
14	Kota Lubuklinggau	0,0553	0,0546	0,0812	0,0858	0,0963	0,1143	0,0980*
15	Kota Pagar Alam	0,0473	0,0489	0,0714	0,0628	0,0807	0,0957	0,0714*
16	Kota Palembang	0,2225	0,2507	0,2566	0,2502	0,2753	0,2735	0,2711*
17	Kota Prabumulih	0,0654	0,0733	0,0885	0,0917	0,1070	0,0949	0,0827

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
VII	BENGKULU							
1	Kab. Bengkulu Selatan	0,0419	0,0572	0,0634	0,0571	0,0620	0,0735	0,0792*
2	Kab. Bengkulu Tengah	0,0183	0,0287	0,0282	0,0348	0,0324	0,0317	0,0288*
3	Kab. Bengkulu Utara	0,0437	0,0647	0,0518	0,0603	0,0619	0,1025	0,0585*
4	Kab. Kaur	0,0224	0,0361	0,0327	0,0382	0,0498	0,0494	0,0619*
5	Kab. Kepahiang	0,0395	0,0482	0,0450	0,0460	0,0435	0,0504	0,0496*
6	Kab. Lebong	0,0282	0,0331	0,0288	0,0238	0,0309	0,0531	0,0376*
7	Kab. Mukomuko	0,0336	0,0532	0,0564	0,0728	0,0629	0,1010	0,0864*
8	Kab. Rejang Lebong	0,0584	0,0811	0,0676	0,0721	0,0756	0,0803	0,0698 *
9	Kab. Seluma	0,0300	0,0402	0,0361	0,0334	0,0305	0,0650	0,0660*
10	Kota Bengkulu	0,0705	0,0872	0,1022	0,0977	0,1160	0,1667	0,1562*
VIII	LAMPUNG							
1	Kab. Lampung Barat	0,0396	0,0643	0,0519	0,0481	0,0438	0,0449	0,0582*
2	Kab. Lampung Selatan	0,0824	0,0979	0,1044	0,1008	0,0993	0,1037	0,1208*
3	Kab. Lampung Tengah	0,0507	0,0605	0,0575	0,0608	0,0626	0,0668	0,0753*
4	Kab. Lampung Timur	0,0296	0,0536	0,0505	0,0495	0,0555	0,0610	0,0692*
5	Kab. Lampung Utara	0,0418	0,0626	0,0666	0,0630	0,0575	0,0595	0,0573*
6	Kab. Mesuji	0,0261	0,0374	0,0303	0,0381	0,0295	0,0393	0,0510*
7	Kab. Pesawaran	0,0329	0,0399	0,0389	0,0354	0,0378	0,0453	0,0514*
8	Kab Pesisir barat	0,1003	0,0285	0,0203	0,0280	0,0265	0,0303	0,0353*
9	Kab. Pringsewu	0,0445	0,0718	0,0595	0,0607	0,0615	0,0624	0,0716*
10	Kab. Tanggamus	0,0249	0,0220	0,0178	0,0163	0,0359	0,0402	0,0444*
11	Kab. Tulang Bawang	0,0526	0,0304	0,0346	0,0231	0,0353	0,0546	0,0693*
12	Kab. Tulang Bawang Barat	0,0182	0,0276	0,0204	0,0241	0,0268	0,0292	0,0326*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
13	Kab. Way Kanan	0,0319	0,0526	0,0456	0,0381	0,0370	0,0410	0,0446*
14	Kota Bandar Lampung	0,2072	0,2149	0,2156	0,2350	0,2321	0,2545	0,2749*
15	Kota Metro	0,1181	0,1380	0,1721	0,1318	0,1554	0,1554	0,1901*
IX	BANGKA BELITUNG							
1	Kab. Bangka	0,0777	0,0969	0,1080	0,1198	0,1412	0,1581	0,1149*
2	Kab. Bangka Barat	0,0759	0,0585	0,0738	0,0630	0,0637	0,0805	0,0741*
3	Kab. Bangka Selatan	0,0359	0,0440	0,0515	0,0597	0,0745	0,0571	0,0669*
4	Kab. Bangka Tengah	0,0741	0,0902	0,0869	0,0921	0,0928	0,0853	0,0950*
5	Kab. Belitung	0,1418	0,1424	0,1485	0,1517	0,1776	0,1993	0,1641*
6	Kab. Belitung Timur	0,0974	0,1078	0,1172	0,1197	0,1272	0,1328	0,1255*
7	Kota Pangkalpinang	0,1391	0,1526	0,1696	0,1393	0,1733	0,1826	0,1693*
X	KEPULAUAN RIAU							
1	Kab. Bintan	0,1490	0,2159	0,2387	0,1967	0,2215	0,2540	0,2815*
2	Kab. Karimun	0,2594	0,2944	0,3723	0,3345	0,3422	0,2708	0,2804*
3	Kab. Kepulauan Anambas	0,0331	0,0250	0,0269	0,0368	0,0449	0,0420	0,0326*
4	Kab. Lingga	0,0411	0,0306	0,0355	0,0280	0,0297	0,0356	0,0415*
5	Kab. Natuna	0,0320	0,0341	0,0440	0,0438	0,0705	0,0495	0,0418*
6	Kota Batam	0,3467	0,3858	0,4321	0,3977	0,4058	0,4596	0,4549*
7	Kota Tanjungpinang	0,1195	0,1458	0,1762	0,1329	0,1487	0,1742	0,1506*
XI	DKI JAKARTA							
XII	JAWA BARAT							
1	Kab. Bandung	0,1506	0,1738	0,1752	0,1859	0,1844	0,1763	0,1789*
2	Kab. Bandung Barat	0,1120	0,1301	0,1460	0,1678	0,1642	0,1623	0,1819*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3	Kab. Bekasi	0,3433	0,3944	0,4077	0,4192	0,4080	0,4032	0,4300*
4	Kab. Bogor	0,2758	0,3185	0,3319	0,3837	0,3718	0,3828	0,3884*
5	Kab. Ciamis	0,0535	0,0909	0,0786	0,0863	0,0864	0,0903	0,0896*
6	Kab. Cianjur	0,1184	0,1566	0,1460	0,1404	0,1422	0,1418	0,1527*
7	Kab. Cirebon	0,1083	0,1657	0,1514	0,1573	0,1563	0,1588	0,1585*
8	Kab. Garut	0,0878	0,1185	0,1184	0,1028	0,1565	0,0979	0,1015*
9	Kab. Indramayu	0,0824	0,1273	0,1204	0,1122	0,1236	0,1258	0,1161*
10	Kab. Karawang	0,2455	0,2843	0,2912	0,2809	0,2777	0,2792	0,2899*
11	Kab. Kuningan	0,0692	0,1070	0,0966	0,1043	0,1015	0,1199	0,1091*
12	Kab. Majalengka	0,0795	0,1085	0,1138	0,1287	0,1448	0,1597	0,1484*
13	Kab. Pangandaran	na	0,0501	0,0631	0,0715	0,0661	0,0978	0,0779*
14	Kab. Purwakarta	0,1267	0,1837	0,1882	0,1811	0,1668	0,1790	0,1937*
15	Kab. Subang	0,0789	0,1177	0,1307	0,1403	0,1463	0,1411	0,1510*
16	Kab. Sukabumi	0,1135	0,1553	0,1586	0,1612	0,1488	0,1503	0,1525*
17	Kab. Sumedang	0,1105	0,1446	0,1389	0,1445	0,1636	0,1560	0,1495*
18	Kab. Tasikmalaya	0,0318	0,0601	0,0678	0,0673	0,0681	0,0698	0,0752*
19	Kota Bandung	0,3330	0,3464	0,3648	0,3787	0,4496	0,4329	0,4024*
20	Kota Banjar	0,1137	0,1763	0,1630	0,1427	0,1545	0,1452	0,1264*
21	Kota Bekasi	0,3273	0,3463	0,3792	0,3804	0,3774	0,4138	0,4095*
22	Kota Bogor	0,2952	0,3100	0,3280	0,3642	0,3883	0,3861	0,3763*
23	Kota Cimahi	0,1964	0,2041	0,2265	0,2347	0,2591	0,2545	0,2597*
24	Kota Cirebon	0,2040	0,2419	0,2279	0,2644	0,2906	0,3095	0,2906*
25	Kota Depok	0,3025	0,2986	0,3323	0,3709	0,3807	0,3604	0,3995*
26	Kota Sukabumi	0,2078	0,2593	0,2595	0,2539	0,2649	0,2961	0,2676*
27	Kota Tasikmalaya	0,1265	0,1588	0,1514	0,1584	0,1570	0,1520	0,1456*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
XIII	JAWA TENGAH							
1	Kab. Banjarnegara	0,0773	0,1152	0,1066	0,1204	0,0972	0,1138	0,1224*
2	Kab. Banyumas	0,1513	0,1887	0,1892	0,1898	0,1924	0,1985	0,1999*
3	Kab. Batang	0,1321	0,1425	0,1287	0,1401	0,1403	0,1396	0,1351*
4	Kab. Blora	0,0736	0,0954	0,0949	0,0922	0,0984	0,0958	0,1102*
5	Kab. Boyolali	0,1099	0,1359	0,1345	0,1466	0,1405	0,1539	0,1672*
6	Kab. Brebes	0,0751	0,1310	0,1249	0,1318	0,1833	0,1215	0,1211*
7	Kab. Cilacap	0,1313	0,1580	0,1497	0,1533	0,1561	0,1717	0,1749*
8	Kab. Demak	0,0988	0,1345	0,1423	0,1472	0,1502	0,1597	0,1725*
9	Kab. Grobogan	0,0927	0,1375	0,1352	0,1358	0,1692	0,1294	0,1335*
10	Kab. Jepara	0,0965	0,1448	0,1400	0,1531	0,1504	0,1637	0,1590*
11	Kab. Karanganyar	0,1181	0,1332	0,1393	0,1497	0,1637	0,1623	0,1725*
12	Kab. Kebumen	0,0808	0,1231	0,1054	0,1117	0,1170	0,1334	0,1452*
13	Kab. Kendal	0,0980	0,1392	0,1392	0,1403	0,1544	0,1571	0,1573*
14	Kab. Klaten	0,0665	0,0927	0,0875	0,0993	0,1017	0,1536	0,1162*
15	Kab. Kudus	0,1046	0,1454	0,1454	0,1485	0,1534	0,1690	0,1645*
16	Kab. Magelang	0,1213	0,1464	0,1344	0,1417	0,1364	0,1412	0,1620*
17	Kab. Pati	0,0991	0,1439	0,1421	0,1288	0,1266	0,1377	0,1282*
18	Kab. Pekalongan	0,1200	0,1730	0,1482	0,1738	0,1477	0,1481	0,1564*
19	Kab. Pemasang	0,0917	0,1288	0,1172	0,1304	0,1145	0,1237	0,1330*
20	Kab. Purbalingga	0,1035	0,1506	0,1376	0,1442	0,1344	0,1451	0,1474*
21	Kab. Purworejo	0,0990	0,1390	0,1270	0,1235	0,1412	0,1400	0,1291*
22	Kab. Rembang	0,1088	0,1245	0,1371	0,1496	0,1408	0,1661	0,1693*
23	Kab. Semarang	0,1570	0,1623	0,1663	0,1610	0,1955	0,1811	0,1856*
24	Kab. Sragen	0,0999	0,1444	0,1323	0,1420	0,1470	0,1536	0,1601*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
25	Kab. Sukoharjo	0,1413	0,1686	0,1760	0,1880	0,1943	0,2109	0,2147*
26	Kab. Tegal	0,0993	0,1376	0,1450	0,1462	0,1532	0,1475	0,1582*
27	Kab. Temanggung	0,0969	0,1272	0,1397	0,1634	0,1733	0,1456	0,1482*
28	Kab. Wonogiri	0,0749	0,1064	0,1076	0,1074	0,1056	0,1171	0,1176*
29	Kab. Wonosobo	0,0950	0,1373	0,1275	0,1269	0,1246	0,1225	0,1217*
30	Kota Magelang	0,1697	0,2244	0,2389	0,2623	0,2568	0,2752	0,2827*
31	Kota Pekalongan	0,1692	0,1890	0,1878	0,2083	0,1839	0,1980	0,2186*
32	Kota Salatiga	0,1759	0,2278	0,2225	0,2316	0,2287	0,2348	0,2544*
33	Kota Semarang	0,3311	0,3596	0,3590	0,3635	0,4214	0,4301	0,4526*
34	Kota Surakarta	0,2149	0,2197	0,2376	0,2498	0,2660	0,2795	0,2806*
35	Kota Tegal	0,2436	0,2955	0,2867	0,2734	0,2994	0,1475	0,2754*
XIV	DI YOGYAKARTA							
1	Kab. Bantul	0,1475	0,1970	0,2002	0,2022	0,2032	0,2077	0,2222*
2	Kab. Gunungkidul	0,0672	0,1160	0,1226	0,1247	0,1152	0,1226	0,1206*
3	Kab. Kulon Progo	0,0957	0,1416	0,1392	0,1323	0,1489	0,1353	0,1421*
4	Kab. Sleman	0,2365	0,2761	0,2766	0,3078	0,3157	0,3297	0,3422*
5	Kota Yogyakarta	0,2925	0,3224	0,3560	0,3426	0,3960	0,3843	0,3902*
XV	JAWA TIMUR							
1	Kabupaten Bangkalan	0,0660	0,0814	0,0946	0,1092	0,1018	0,0980	0,1125*
2	Kabupaten Gresik	0,2732	0,3175	0,3283	0,2837	0,2912	0,3328	0,3144*
3	Kabupaten Sumenep	0,0648	0,0986	0,0884	0,1015	0,0883	0,0828	0,0979*
4	Kabupaten Lamongan	0,0962	0,1383	0,1320	0,1484	0,1580	0,1553	0,1648*
5	Kabupaten Sampang	0,0602	0,0902	0,0821	0,0791	0,0867	0,0797	0,0910*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6	Kabupaten Sidoarjo	0,3185	0,3407	0,3562	0,3640	0,3766	0,3890	0,3802*
7	Kota Surabaya	0,5332	0,5464	0,6097	0,5992	0,6201	0,6083	0,6140*
8	Kabupaten Pamekasan	0,0733	0,1123	0,1012	0,0976	0,0987	0,1208	0,1144*
9	Kabupaten Bojonegoro	0,1066	0,1157	0,1165	0,1133	0,1171	0,0881	0,1177*
10	Kabupaten Jombang	0,1181	0,1595	0,1692	0,1658	0,1725	0,1744	0,1786*
11	Kabupaten Madiun	0,0705	0,0876	0,0922	0,0947	0,1075	0,1197	0,1177*
12	Kota Madiun	0,1187	0,1434	0,1691	0,1735	0,2200	0,2291	0,2303
13	Kabupaten Ponorogo	0,0923	0,1166	0,1129	0,1185	0,1051	0,1256	0,1244*
14	Kabupaten Pacitan	0,0593	0,0803	0,0886	0,0985	0,0937	0,1035	0,1158*
15	Kabupaten Mojokerto	0,1462	0,1889	0,1959	0,2062	0,1821	0,2244	0,2164*
16	Kabupaten Ngawi	0,0605	0,1005	0,1000	0,0989	0,1053	0,1077	0,1158*
17	Kabupaten Tuban	0,1488	0,1596	0,1715	0,1666	0,1738	0,1802	0,1955*
18	Kabupaten Magetan	0,0717	0,0959	0,1065	0,0992	0,0931	0,1076	0,1226*
19	Kota Mojokerto	0,1317	0,1527	0,1801	0,1879	0,2084	0,2056	0,2175*
20	Kabupaten Blitar	0,0721	0,0980	0,1021	0,1000	0,1024	0,1073	0,1190*
21	Kabupaten Kediri	0,1135	0,1429	0,1356	0,1415	0,1503	0,1663	0,1992*
22	Kabupaten Malang	0,1037	0,1344	0,1331	0,1462	0,1507	0,1530	0,1531*
23	Kabupaten Nganjuk	0,0982	0,1401	0,1427	0,1540	0,1446	0,1526	0,1465*
24	Kabupaten Trenggalek	0,0645	0,0887	0,1005	0,1116	0,1098	0,1282	0,1432*
25	Kabupaten Tulungagung	0,0982	0,1308	0,1307	0,1333	0,1936	0,1677	0,1760*
26	Kota Batu	0,1017	0,1144	0,1436	0,1363	0,1759	0,1651	0,1857*
27	Kota Blitar	0,1189	0,1461	0,1575	0,1557	0,2289	0,1823	0,1766*
28	Kota Kediri	0,1475	0,1743	0,1807	0,2020	0,2365	0,1948	0,1526*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
29	Kota Malang	0,2084	0,2111	0,2323	0,2742	0,2983	0,2730	0,2688*
30	Kota Pasuruan	0,1147	0,1435	0,1553	0,1873	0,1756	0,1927	0,1788*
31	Kabupaten Pasuruan	0,1529	0,1909	0,1899	0,1704	0,2480	0,1694	0,1946*
32	Kota Probolinggo	0,1148	0,1547	0,1656	0,1933	0,2239	0,1780	0,1827*
33	Kabupaten Probolinggo	0,0785	0,1179	0,1126	0,1124	0,1432	0,1072	0,1020*
34	Kabupaten Lumajang	0,0865	0,1256	0,1245	0,1314	0,1658	0,1300	0,1356*
35	Kabupaten Jember	0,1303	0,1575	0,1482	0,1642	0,2067	0,1665	0,1750*
36	Kabupaten Bondowoso	0,0628	0,0878	0,0883	0,0910	0,1190	0,0970	0,1013*
37	Kabupaten Situbondo	0,0703	0,0954	0,0977	0,1100	0,1410	0,1067	0,1125*
38	Kabupaten Banyuwangi	0,0956	0,1172	0,1249	0,1311	0,1424	0,1399	0,1577*
XVI	BANTEN							
1	Kab. Lebak	0,0923	0,1361	0,1348	0,1220	0,1931	0,1395	0,1181*
2	Kab. Pandeglang	0,0523	0,0802	0,0798	0,0899	0,1570	0,0834	0,0828*
3	Kab. Serang	0,2364	0,2308	0,2515	0,2394	0,2901	0,2388	0,2298*
4	Kab. Tangerang	0,3516	0,4262	0,4377	0,4281	0,5245	0,4746	0,4814*
5	Kota Cilegon	0,2662	0,3587	0,4113	0,3507	0,3585	0,3548	0,3593*
6	Kota Serang	0,0753	0,0955	0,1004	0,1121	0,1272	0,1322	0,1416*
7	Kota Tangerang	0,3194	0,4173	0,4355	0,4693	0,4708	0,4694	0,4739*
8	Kota Tangerang Selatan	0,3610	0,4462	0,4720	0,5053	0,5101	0,5050	0,5277*
XVII	BALI							
1	Kab. Badung	0,7714	0,7869	0,8036	0,8233	0,8322	0,8405	0,8347*
2	Kab. Bangli	0,0806	0,0959	0,1005	0,1008	0,0957	0,1109	0,1077*
3	Kab. Buleleng	0,1153	0,1419	0,1512	0,1365	0,1666	0,1635	0,1577*
4	Kab. Gianyar	0,2560	0,2901	0,2993	0,3149	0,3353	0,3846	0,4290*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5	Kab. Jembrana	0,0919	0,1078	0,1086	0,1063	0,1022	0,1153	0,1168*
6	Kab. Karangasem	0,1523	0,1918	0,1778	0,1591	0,1302	0,1351	0,1414*
7	Kab. Klungkung	0,0947	0,1195	0,1314	0,1310	0,1394	0,1700	0,1844*
8	Kab. Tabanan	0,2038	0,2000	0,1861	0,1772	0,2043	0,1951	0,1792*
9	Kota Denpasar	0,4258	0,4044	0,4345	0,4153	0,4901	0,4432	0,4608*
XVIII	NTB							
1	Kab. Bima	0,0506	0,0864	0,0717	0,0679	0,1116	0,0690	0,0750*
2	Kab. Dompu	0,0411	0,0941	0,0796	0,0787	0,0938	0,0878	0,0907*
3	Kab. Lombok Barat	0,1107	0,1480	0,1246	0,1361	0,1312	0,1313	0,1265*
4	Kab. Lombok Tengah	0,0938	0,0987	0,0962	0,0860	0,1025	0,0948	0,0939*
5	Kab. Lombok Timur	0,0664	0,1065	0,1090	0,1062	0,1056	0,1031	0,1059*
6	Kab. Lombok Utara	0,1004	0,1380	0,1575	0,1506	0,1657	0,1446	0,1399*
7	Kab. Sumbawa	0,0710	0,1092	0,1026	0,0885	0,1149	0,0897	0,0919*
8	Kab. Sumbawa Barat	0,0514	0,0675	0,0694	0,0489	0,1248	0,0616	0,0714
9	Kota Bima	0,0292	0,0394	0,0426	0,0391	0,0364	0,0600	0,0654*
10	Kota Mataram	0,1616	0,1870	0,1893	0,2065	0,2373	0,2530	0,2556*
XIX	NTT							
1	Kab. Alor	0,0492	0,0580	0,0498	0,0480	0,0442	0,0564	0,0452*
2	Kab. Belu	0,0759	0,1197	0,0980	0,0916	0,0903	0,0957	0,0889*
3	Kab. Ende	0,0613	0,0789	0,0644	0,0596	0,0553	0,0558	0,0499*
4	Kab. Flores Timur	0,0464	0,0596	0,0562	0,0474	0,0536	0,0511	0,0547*
5	Kab. Kupang	0,0566	0,0713	0,0630	0,0626	0,0602	0,0535	0,0438*
6	Kab. Lembata	0,0480	0,0528	0,0486	0,0483	0,0519	0,0540	0,0567*
7	Kab. Malaka	na	0,0314	0,0420	0,0444	0,0456	0,0545	0,0585*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8	Kab. Manggarai	0,0705	0,0934	0,0779	0,0733	0,0759	0,0819	0,0843*
9	Kab. Manggarai Barat	0,0640	0,0750	0,0847	0,1032	0,0868	0,0982	0,1460*
10	Kab. Manggarai Timur	0,0357	0,0370	0,0578	0,0511	0,0470	0,0429	0,0488*
11	Kab. Nagekeo	0,0358	0,0462	0,0455	0,0411	0,0426	0,0443	0,0392*
12	Kab. Ngada	0,0619	0,0676	0,0611	0,0604	0,0528	0,0543	0,0611*
13	Kab. Rote Ndao	0,0359	0,0480	0,0455	0,0407	0,0349	0,0358	0,0387*
14	Kab. Sabu Raijua	0,0385	0,0608	0,0610	0,0564	0,0651	0,0553	0,0504*
15	Kab. Sikka	0,0745	0,0962	0,0885	0,0753	0,0881	0,0901	0,0804*
16	Kab. Sumba Barat	0,0563	0,0679	0,0849	0,0890	0,0947	0,1054	0,0553*
17	Kab. Sumba Barat Daya	0,0337	0,0648	0,0612	0,0519	0,0517	0,0440	0,0455*
18	Kab. Sumba Tengah	0,0393	0,0468	0,0462	0,0409	0,0368	0,0513	0,0490*
19	Kab. Sumba Timur	0,0578	0,0800	0,0744	0,0636	0,0663	0,0693	0,0821*
20	Kab. Timor Tengah Selatan	0,0433	0,0672	0,0707	0,0598	0,0983	0,0491	0,0510*
21	Kab. Timor Tengah Utara	0,0296	0,0465	0,0461	0,0522	0,0479	0,0532	0,0520*
22	Kota Kupang	0,0989	0,1175	0,1422	0,1450	0,1565	0,1466	0,1589*
XX	KALIMANTAN BARAT							
1	Kab. Bengkayang	0,0337	0,0499	0,0392	0,0406	0,0409	0,0503	na
2	Kab. Kapuas Hulu	0,0288	0,0647	0,0480	0,0393	0,0553	0,0449	0,0461*
3	Kab. Kayong Utara	0,0230	0,0334	0,0219	0,0154	0,0247	0,0359	0,0368*
4	Kab. Ketapang	0,0942	0,0713	0,0672	0,0709	0,0842	0,0878	0,0832*
5	Kab. Kubu Raya	0,0673	0,0890	0,0668	0,0731	0,1075	0,1170	0,1127*
6	Kab. Landak	0,0392	0,0866	0,0391	0,0411	0,0555	0,0593	0,0675*
7	Kab. Melawi	0,0301	0,0341	0,0323	0,0323	0,0299	0,0385	0,0349*
8	Kab. Mempawah	0,0619	0,0779	0,0605	0,0634	0,0722	0,0734	0,0848*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Kab. Sambas	0,0437	0,0969	0,0593	0,0644	0,0691	0,0751	0,0775*
10	Kab. Sanggau	0,0616	0,0719	0,0670	0,0704	0,0601	0,0748	0,0711*
11	Kab. Sekadau	0,0599	0,0536	0,0467	0,0468	0,0509	0,0667	0,0517*
12	Kab. Sintang	0,0616	0,0795	0,0694	0,0647	0,0580	0,1219	0,0873*
13	Kota Pontianak	0,2127	0,2246	0,2193	0,2577	0,2716	0,2648	0,2714*
14	Kota Singkawang	0,0770	0,1223	0,1266	0,1307	0,1562	0,1489	0,1807*
XXI	KALIMANTAN TENGAH							
1	Kab. Barito Selatan	0,0351	0,0417	0,0504	0,0472	0,0529	0,0818	0,0748*
2	Kab. Barito Timur	0,0247	0,0800	0,0473	0,0402	0,1049	0,0551	0,0633*
3	Kab. Barito Utara	0,0440	0,0476	0,0514	0,0466	0,0602	0,0635	0,0593*
4	Kab. Gunung Mas	0,0369	0,0428	0,0389	0,0382	0,0352	0,0412	0,0729
5	Kab. Kapuas	0,0407	0,0580	0,0594	0,0500	0,0543	0,0636	0,0825
6	Kab. Katingan	0,0505	0,0546	0,0383	0,0411	0,0456	0,0423	0,0514*
7	Kab. Kotawaringin Barat	0,0989	0,1200	0,1151	0,1084	0,1122	0,1392	0,1254
8	Kab. Kotawaringin Timur	0,1120	0,1340	0,1123	0,1125	0,1245	0,1215	0,1225
9	Kab. Lamandau	0,0332	0,0536	0,0525	0,0483	0,1880	0,1066	0,0831
10	Kab. Murung Raya	0,0294	0,0415	0,0521	0,0283	0,0465	0,0487	0,0667*
11	Kab. Pulang Pisau	0,0274	0,0440	0,0403	0,0383	0,0379	0,0413	0,0806
12	Kab. Seruyan	0,0252	0,0368	0,0457	0,0546	0,0856	0,0828	0,0792
13	Kab. Sukamara	0,0332	0,0394	0,0435	0,0519	0,0630	0,0645	0,0561*
14	Kota Palangka Raya	0,0718	0,0910	0,1141	0,1063	0,1148	0,1341	0,1528*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
XXII	KALIMANTAN SELATAN							
1	Kab. Balangan	0,0425	0,0685	0,0522	0,0462	0,0657	0,0533	0,0545*
2	Kab. Banjar	0,1556	0,1307	0,1149	0,1106	0,1103	0,1080	0,1173*
3	Kab. Barito Kuala	0,0383	0,0711	0,0594	0,0486	0,0747	0,0820	0,0625*
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	0,0644	0,0935	0,0902	0,0811	0,1067	0,1008	0,1125*
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	0,0602	0,0952	0,0751	0,0765	0,0848	0,0791	0,0952*
6	Kab. Hulu Sungai Utara	0,0555	0,1008	0,0908	0,0792	0,1074	0,0911	0,1098*
7	Kab. Kotabaru	0,0845	0,0867	0,1070	0,0988	0,0856	0,0917	0,0816*
8	Kab. Tabalong	0,0395	0,4187	0,0990	0,0896	0,1177	0,1164	0,1119*
9	Kab. Tanah Bumbu	0,0784	0,0987	0,0929	0,0794	0,1128	0,1169	0,0778*
10	Kab. Tanah Laut	0,0845	0,1117	0,1120	0,1025	0,1063	0,0825	0,0908*
11	Kab. Tapin	0,0449	0,0593	0,0526	0,0507	0,0652	0,0769	0,0713*
12	Kota Banjarbaru	0,1063	0,1470	0,1564	0,1586	0,2010	0,2113	0,2312*
13	Kota Banjarmasin	0,1302	0,1511	0,1606	0,1627	0,1784	0,1760	0,1997*
XXIII	KALIMANTAN TIMUR							
1	Kab. Berau	0,0938	0,1019	0,1058	0,1041	0,1014	0,0907	0,0782*
2	Kab. Kutai Barat	0,0393	0,0595	0,0404	0,0449	0,0658	0,0480	0,0660*
3	Kab. Kutai Kertanegara	0,0638	0,0525	0,0624	0,0647	0,1011	0,0749	0,0961*
4	Kab. Kutai Timur	0,0262	0,0647	0,0415	0,1530	0,0755	0,0458	0,0524*
5	Kab. Mahakam Ulu	0,0047	0,0047	0,0159	0,0166	0,0123	0,0140	0,0122*
6	Kab. Paser	0,0486	0,0522	0,0540	0,0641	0,0735	0,0726	0,0627*
7	Kab. Penajam Paser Utara	0,0385	0,0433	0,0514	0,1678	0,1044	0,0457	0,0572*
8	Kota Balikpapan	0,1943	0,3012	0,2596	0,2811	0,3267	0,2900	0,3094*
9	Kota Bontang	0,0486	0,1102	0,1053	0,1413	0,1463	0,1590	0,1476*
10	Kota Samarinda	0,1317	0,1531	0,1468	0,1606	0,1895	0,1848	0,1676*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
XXIV	KALIMANTAN UTARA							
1	Kab. Bulungan	0,0564	0,0797	0,1209	0,0822	0,1104	0,1050	0,1074*
2	Kab. Malinau	0,0532	0,0561	0,0557	0,0356	0,0451	0,0405	0,0483*
3	Kab. Nunukan	0,0605	0,0687	0,0981	0,0554	0,0666	0,0681	0,0866*
4	Kab. Tana Tidung	0,0333	0,0417	0,0689	0,0282	0,0411	0,0300	0,0289*
5	Kota Tarakan	0,0641	0,0652	0,1126	0,0613	0,0867	0,0818	0,0795*
XXV	SULAWESI UTARA							
1	Kab. Bolaang Mongondow	0,0341	0,0477	0,0519	0,0511	0,0352	0,0424	0,0476
2	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	0,0216	0,0321	0,0311	0,0290	0,0244	0,0302	0,0306*
3	Kab. Bolaang Mongondow Timur	0,0251	0,0263	0,0254	0,0345	0,0178	0,0248	0,0360*
4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	0,0249	0,0246	0,0262	0,0278	0,0232	0,0237	0,0360
5	Kab. Kep. Sangihe	0,0520	0,0717	0,0658	0,0595	0,0526	0,0696	0,0663*
6	Kab. Kep. Sitaro	0,0320	0,0444	0,0382	0,0299	0,0303	0,0340	0,0388*
7	Kab. Kep. Talaud	0,0218	0,0360	0,0353	0,0371	0,0267	0,0289	0,0350*
8	Kab. Minahasa	0,0397	0,0630	0,0648	0,0593	0,0702	0,0746	0,0754*
10	Kab. Minahasa Selatan	0,0238	0,0382	0,0368	0,0328	0,0328	0,0377	0,0442
11	Kab. Minahasa Tenggara	0,0191	0,0264	0,0271	0,0246	0,0289	0,0258	0,0295*
12	Kab. Minahasa Utara	0,0612	0,0742	0,0694	0,0620	0,0740	0,1092	0,1031*
13	Kota Bitung	0,0847	0,1121	0,1466	0,0975	0,1241	0,1133	0,1002
14	Kota Kotamobagu	0,0335	0,0514	0,0553	0,0625	0,0825	0,0895	0,0930*
15	Kota Manado	0,1792	0,1980	0,1676	0,2068	0,2095	0,2486	0,2480*
16	Kota Tomohon	0,0302	0,0381	0,0445	0,0396	0,0476	0,0537	0,0662*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
XXVI	SULAWESI TENGAH							
1	Kab. Banggai	0,0685	0,0789	0,0814	0,0813	0,0744	0,0731	0,0863*
2	Kab. Banggai Kep.	0,0232	0,0329	0,0343	0,0268	0,0285	0,0292	0,0361*
3	Kab. Banggai Laut	na	0,0319	0,0266	0,0360	0,0316	0,0358	0,0400*
4	Kab. Buol	0,0532	0,0560	0,0551	0,0590	0,0551	0,0725	0,0621*
5	Kab. Donggala	0,0524	0,0681	0,0552	0,0560	0,0555	0,0516	0,0448*
6	Kab. Morowali	0,0438	0,0535	0,0891	0,0770	0,1665	0,1655	0,1904*
7	Kab. Morowali Utara	na	0,0787	0,0540	0,0428	0,0404	0,0567	0,0550*
8	Kab. Parigi Moutong	0,0405	0,0786	0,0666	0,0621	0,0643	0,1098	0,1060*
9	Kab. Poso	0,0407	0,0684	0,0610	0,0568	0,0635	0,0720	0,0748*
10	Kab. Sigi	0,0207	0,0310	0,0273	0,0270	0,0423	0,0445	0,0339*
11	Kab. Tojo Una-Una	0,0484	0,0616	0,0547	0,0456	0,0277	0,0606	0,0667*
12	Kab. Tolitoli	0,0353	0,0642	0,0735	0,0688	0,0604	0,0774	0,0798*
13	Kota Palu	0,1263	0,1770	0,1918	0,2008	0,1824	0,2032	0,1084*
XXVII	SULAWESI SELATAN							
1	Kab. Bantaeng	0,0457	0,0695	0,0546	0,0588	0,0474	0,1015	0,0998*
2	Kab. Barru	0,0636	0,0671	0,0613	0,0857	0,1062	0,1086	0,1104*
3	Kab. Bone	0,0617	0,1013	0,0855	0,0882	0,0871	0,0952	0,0943*
4	Kab. Bulukumba	0,0412	0,1019	0,0770	0,0909	0,1035	0,0965	0,1070*
5	Kab. Enrekang	0,0332	0,0475	0,0535	0,0546	0,0702	0,0651	0,0688*
6	Kab. Gowa	0,1011	0,1204	0,1067	0,1161	0,1029	0,1219	0,1274*
7	Kab. Jeneponto	0,0230	0,0572	0,0586	0,0615	0,0900	0,0759	0,0746*
8	Kab. Kep. Selayar	0,0368	0,0531	0,0535	0,0493	0,0645	0,0612	0,0731*
9	Kab. Luwu	0,0431	0,0681	0,0637	0,0684	0,0470	0,0808	0,0772

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
10	Kab. Luwu Timur	0,1500	0,1339	0,1410	0,1252	0,1606	0,1806	0,2071*
11	Kab. Luwu Utara	0,0504	0,1461	0,0806	0,1186	0,0905	0,0883	0,0932*
12	Kab. Maros	0,0904	0,1187	0,1248	0,1204	0,1500	0,1547	0,1700*
13	Kab. Pangkajene dan Kep.	0,1114	0,1260	0,1160	0,1115	0,0863	0,1272	0,1272*
14	Kab. Pinrang	0,0608	0,0939	0,0817	0,0883	0,0563	0,1019	0,1025*
15	Kab. Sidenreng Rappang	0,0509	0,0787	0,0714	0,0830	0,0810	0,0972	0,1016*
16	Kab. Sinjai	0,0363	0,0593	0,0767	0,0708	0,0756	0,0838	0,0900*
17	Kab. Soppeng	0,0526	0,0715	0,0665	0,0743	0,0884	0,1138	0,1144*
18	Kab. Takalar	0,0569	0,0888	0,0737	0,0810	0,1051	0,1085	0,0922*
19	Kab. Tana Toraja	0,0588	0,1089	0,0832	0,1012	0,0938	0,0991	0,1007*
20	Kab. Toraja Utara	0,0170	0,0485	0,0427	0,0400	0,0040	0,0396	0,0464*
21	Kab. Wajo	0,0690	0,0903	0,0894	0,0838	0,0924	0,0952	0,0908*
22	Kota Makassar	0,2624	0,2780	0,2807	0,2740	0,3531	0,3458	0,3555*
23	Kota Palopo	0,0855	0,1159	0,1080	0,1335	0,1572	0,1422	0,1607*
24	Kota Parepare	0,1179	0,1574	0,1379	0,1485	0,1372	0,1631	0,1427*
XXVIII SULAWESI TENGGARA								
1	Kab. Bombana	0,0433	0,0551	0,0475	0,0368	0,0377	0,0781	0,0505*
2	Kab. Buton	0,0287	0,0386	0,0378	0,0504	0,0390	0,0350	0,0383*
3	Kab. Buton Selatan	na	na	0,0097	0,0148	0,0162	0,0449	0,0243*
4	Kab. Buton Tengah	na	na	0,0181	0,0204	0,0223	0,0500	0,0236*
5	Kab. Buton Utara	0,0214	0,0221	0,0270	0,0207	0,0229	0,0240	0,0341*
6	Kab. Kolaka	0,0526	0,0862	0,0631	0,0682	0,0774	0,0876	0,0873*
7	Kab. Kolaka Timur	na	0,0240	0,0231	0,0239	0,0254	0,0596	0,0352*
8	Kab. Kolaka Utara	0,0341	0,0554	0,0542	0,0490	0,0541	0,0559	na

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	Kab. Konawe	0,0283	0,0382	0,0521	0,0477	0,0437	0,0619	na
10	Kab. Konawe Kep.	na	0,0203	0,0153	0,0190	0,0105	0,0293	0,0316*
11	Kab. Konawe Selatan	0,0325	0,0529	0,0415	0,0392	0,0445	0,0460	0,0437*
12	Kab. Konawe Utara	0,0395	0,0178	0,0135	0,0146	0,0179	0,0201	0,0202*
13	Kab. Muna	0,0273	0,0424	0,0319	0,0363	0,0387	0,0417	na
14	Kab. Muna Barat	na	na	0,0130	0,0270	0,0414	0,0548	0,0489*
15	Kab. Wakatobi	0,0383	0,0419	0,0366	0,0336	0,0419	0,0410	0,0396*
16	Kota Bau-Bau	0,0553	0,0790	0,0717	0,0800	0,1007	0,0824	0,0961*
17	Kota Kendari	0,1036	0,1611	0,1476	0,1284	0,1560	0,1429	0,1636*
XXIX	GORONTALO							
1	Kab. Boalemo	0,0490	0,0624	0,0611	0,0621	0,0611	0,0666	0,0810*
2	Kab. Bone Bolango	0,0383	0,0739	0,0780	0,0709	0,0758	0,0667	0,0770*
3	Kab. Gorontalo	0,0752	0,1149	0,1036	0,1004	0,1108	0,1016	0,1037*
4	Kab. Gorontalo Utara	0,0266	0,0452	0,0462	0,0360	0,0374	0,0387	0,0414*
5	Kab. Pohuwato	0,0661	0,0621	0,0646	0,0730	0,0613	0,0576	0,0641*
6	Kota Gorontalo	0,1424	0,1620	0,1577	0,1817	0,1933	0,2059	0,2185*
XXX	SULAWESI BARAT							
1	Kab. Majene	0,0367	0,0801	0,0578	0,0632	0,0590	0,1023	0,0669*
2	Kab. Mamasa	0,0169	0,0263	0,0238	0,0281	0,0312	0,0321	0,0316*
3	Kab. Mamuju	0,0371	0,0801	0,0643	0,0631	0,0283	0,0692	0,0712*
4	Kab. Mamuju Tengah	0,0007	0,0175	0,0230	0,0272	0,0303	0,0703	0,0423*
5	Kab. Mamuju Utara	0,0314	0,0391	0,0315	0,0346	0,0337	0,0397	0,0506*
6	Kab. Polewali Mandar	0,0386	0,1015	0,0989	0,0972	0,1093	0,1010	0,1087*

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
XXXI	MALUKU							
1	Kab. Buru	0,0223	0,0284	0,0314	0,0251	0,0274	0,0521	0,0292*
2	Kab. Buru Selatan	0,0062	0,0222	0,0216	0,0366	0,0215	0,0204	0,0226*
3	Kab. Kepulauan Aru	0,0181	0,0188	0,0302	0,0338	0,0403	0,0593	0,0648*
4	Kab. Maluku Barat Daya	0,0203	0,0245	0,0297	0,0474	0,0408	0,0598	0,0567*
5	Kab. Maluku Tengah	0,0239	0,0463	0,0491	0,0752	0,0412	0,0369	0,0419*
6	Kab. Maluku Tenggara	0,0472	0,0591	0,0595	0,0597	0,0402	0,0600	0,0678*
7	Kab. Maluku Tenggara Barat	0,0377	0,0327	0,0399	0,0371	0,0302	0,0477	0,0359*
8	Kab. Seram Bagian Barat	0,0080	0,0214	0,0364	0,0293	0,0200	0,0222	0,0265*
9	Kab. Seram Bagian Timur	0,0204	0,0188	0,0227	0,0243	0,0201	0,0264	0,0264*
10	Kota Ambon	0,0780	0,1037	0,1056	0,1156	0,1230	0,1364	0,1359*
11	Kota Tual	0,0280	0,0418	0,0367	0,0325	0,0334	0,0324	0,0363*
XXXII	MALUKU UTARA							
1	Kab. Halmahera Barat	0,0202	0,0322	0,0264	0,0273	0,0233	0,0230	0,0360*
2	Kab. Halmahera Selatan	0,0465	0,0379	0,0263	0,0215	0,0225	0,0236	0,0362*
3	Kab. Halmahera Tengah	0,0534	0,0313	0,0378	0,0213	0,0266	0,0219	0,0612*
4	Kab. Halmahera Timur	0,0312	0,0476	0,0360	0,0312	0,0462	0,0824	0,0614*
5	Kab. Halmahera Utara	0,1688	0,1590	0,1615	0,0885	0,1458	0,1221	0,1045*
6	Kab. Kepulauan Sula	0,0341	0,0243	0,0173	0,0269	0,0283	0,0297	0,0387*
7	Kab. Pulau Morotai	0,0136	0,0121	0,0136	0,0123	0,0203	0,0481	0,0746*
8	Kab. Pulau Taliabu	na	na	0,0231	0,0186	0,0429	0,0159	0,0108*
9	Kota Ternate	0,0627	0,0747	0,0745	0,0786	0,0786	0,1068	0,1080*
10	Kota Tidore Kepulauan	0,0281	0,0425	0,0475	0,0504	0,0482	0,0672	0,0739*

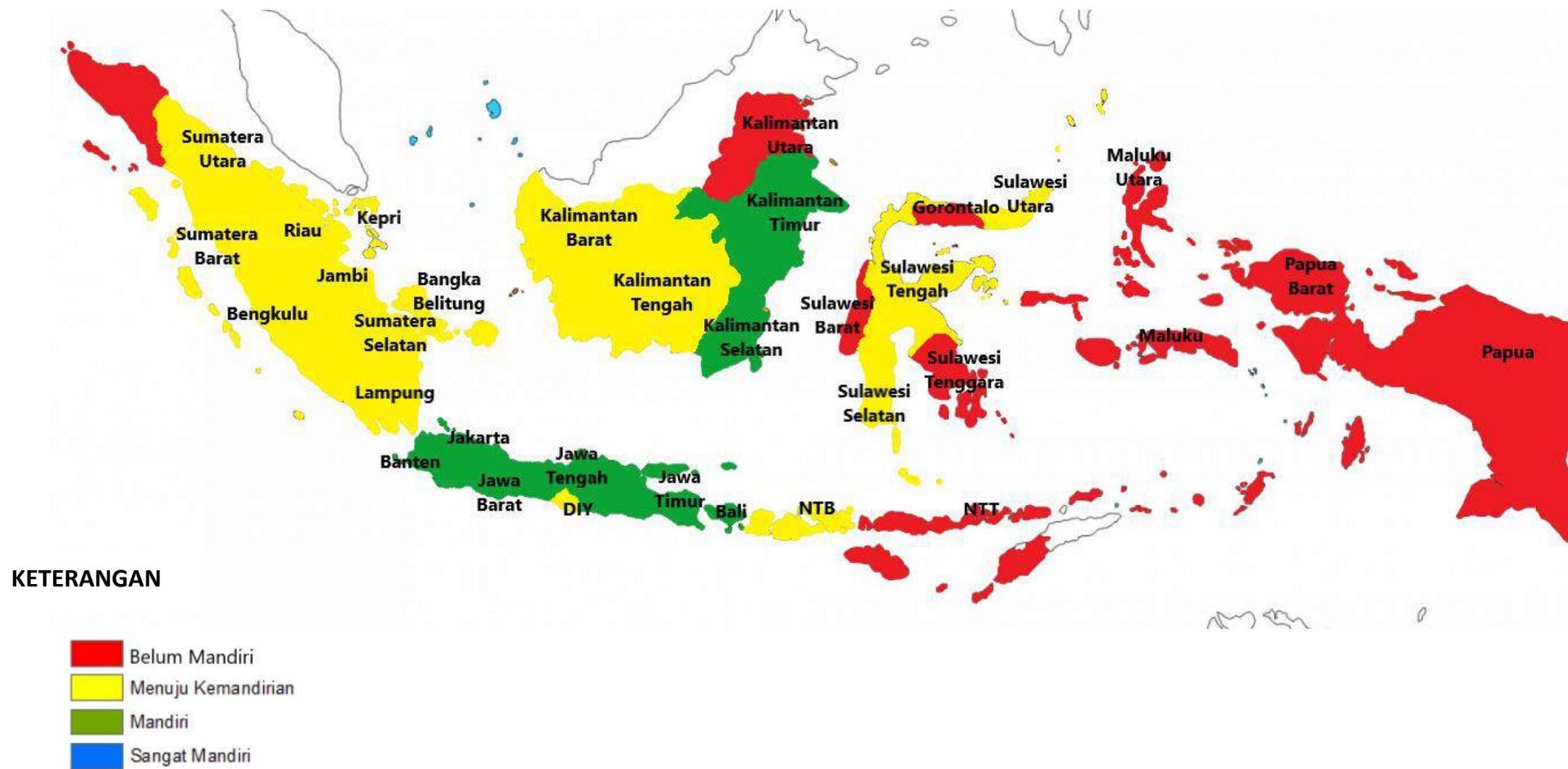
No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
XXXIII	PAPUA							
1	Kab. Asmat	0,0289	0,0551	0,0386	0,0475	0,0258	0,0205	0,0212*
2	Kab. Biak Numfor	0,0220	0,0275	0,0614	0,0203	0,0104	0,0130	na
3	Kab. Boven Digoel	0,0258	0,0121	0,0209	0,0217	0,0211	0,0255	0,0227*
4	Kab. Deiyai	0,0074	0,0055	0,0105	0,0092	0,0024	0,0014	0,0031*
5	Kab. Dogiyai	0,0092	0,0104	0,0103	0,0118	0,0107	0,0114	0,0096*
6	Kab. Intan Jaya	0,0085	0,0096	0,0069	0,0163	0,0047	0,0095	0,0114*
7	Kab. Jayapura	0,0485	0,0798	0,0625	0,0620	0,0790	0,0691	0,0798*
8	Kab. Jayawijaya	0,0312	0,0586	0,0559	0,0477	0,0397	0,0588	0,0412*
9	Kab. Keerom	0,0161	0,0115	0,0140	0,0632	0,0138	0,0186	0,0217*
10	Kab. Kepulauan Yapen	0,0307	0,0409	0,0429	0,0530	0,0388	0,0367	0,0418*
11	Kab. Lanny Jaya	0,0068	0,0151	0,0139	0,0078	0,0359	0,0149	0,0194*
12	Kab. Mamberamo Raya	0,0054	0,0063	0,0113	0,0159	0,0126	0,0073	0,0074*
13	Kab. Mamberamo Tengah	0,0151	0,0152	0,0148	0,0124	0,0097	0,0067	na
14	Kab. Mappi	0,0194	0,0140	0,0142	0,0172	0,0236	0,0266	0,0221*
15	Kab. Merauke	0,0603	0,0764	0,0730	0,0846	0,0742	0,0654	0,1015*
16	Kab. Mimika	0,0968	0,1152	0,1531	0,1169	0,1619	0,1130	0,0811*
17	Kab. Nabire	0,0222	0,0433	0,0165	0,0405	0,0242	0,0333	0,0452*
18	Kab. Nduga	0,0053	0,0036	0,0036	0,0104	0,0155	0,0075	na
19	Kab. Paniai	0,0256	0,0242	0,0212	0,0168	0,0151	0,0193	0,0206*
20	Kab. Pegunungan Bintang	0,0131	0,0194	0,0150	0,0134	0,0085	0,0076	0,0152*
22	Kab. Puncak	0,0195	0,0226	0,0242	0,0078	0,0779	0,0039	0,0087*
23	Kab. Puncak Jaya	0,0061	0,0151	0,0117	0,0174	0,0086	0,0107	0,0077*
24	Kab. Sarmi	0,0076	0,0115	0,0060	0,0241	0,0046	0,0124	0,0177*
25	Kab. Supiori	0,0177	0,0138	0,0118	0,0198	0,0134	0,0160	na

No	Nama Entitas	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	Kab. Tolikara	0,0116	0,0143	0,0131	0,0174	0,0075	0,0116	0,0066*
27	Kab. Waropen	0,0089	0,0110	0,0084	0,0066	0,0039	0,0038	na
28	Kab. Yahukimo	0,0228	0,0194	0,0196	0,0168	0,0143	0,0111	na
29	Kab. Yalimo	0,0045	0,0274	0,0154	0,0153	0,0143	0,0187	na
30	Kota Jayapura	0,1029	0,1289	0,1251	0,1289	0,1594	0,1929	0,1816*
XXXIV	PAPUA BARAT							
1	Kab. Fakfak	0,0273	0,0491	0,0339	0,0400	0,0298	0,0326	0,0308*
2	Kab. Kaimana	0,0234	0,0306	0,0268	0,0395	0,0275	0,0405	0,0264*
3	Kab. Manokwari	0,0185	0,0775	0,0548	0,0463	0,0490	0,0763	0,0768*
4	Kab. Manokwari Selatan	0,0242	0,0026	0,0085	0,0385	0,0128	0,0094	0,0145*
5	Kab. Maybrat	0,0160	0,0164	0,0249	0,0085	0,0020	0,0069	0,0067*
6	Kab. Pegunungan Arfak	na	0,0021	0,0105	0,0090	0,0070	0,0084	0,0087*
7	Kab. Raja Ampat	0,0280	0,0257	0,0345	0,0415	0,0321	0,0175	0,0198*
8	Kab. Sorong	0,0503	0,0655	0,0511	0,0552	0,0575	0,0454	0,0374*
9	Kab. Sorong Selatan	0,0242	0,0387	0,0245	0,0385	0,0221	0,0331	0,0149*
10	Kab. Tambrau	0,0076	0,0033	0,0074	0,0056	0,0047	0,0041	0,0062*
11	Kab. Teluk Bintuni	0,0209	0,0321	0,0308	0,0273	0,0200	0,0219	0,0176*
12	Kab. Teluk Wondama	0,0140	0,0223	0,0242	0,0206	0,0093	0,0143	0,0274*
13	Kota Sorong	0,0738	0,1160	0,0959	0,0909	0,1376	0,1205	0,1233*
	Rata-Rata	0,0793	0,0991	0,0992	0,0098	0,1066	0,1101	0,1131

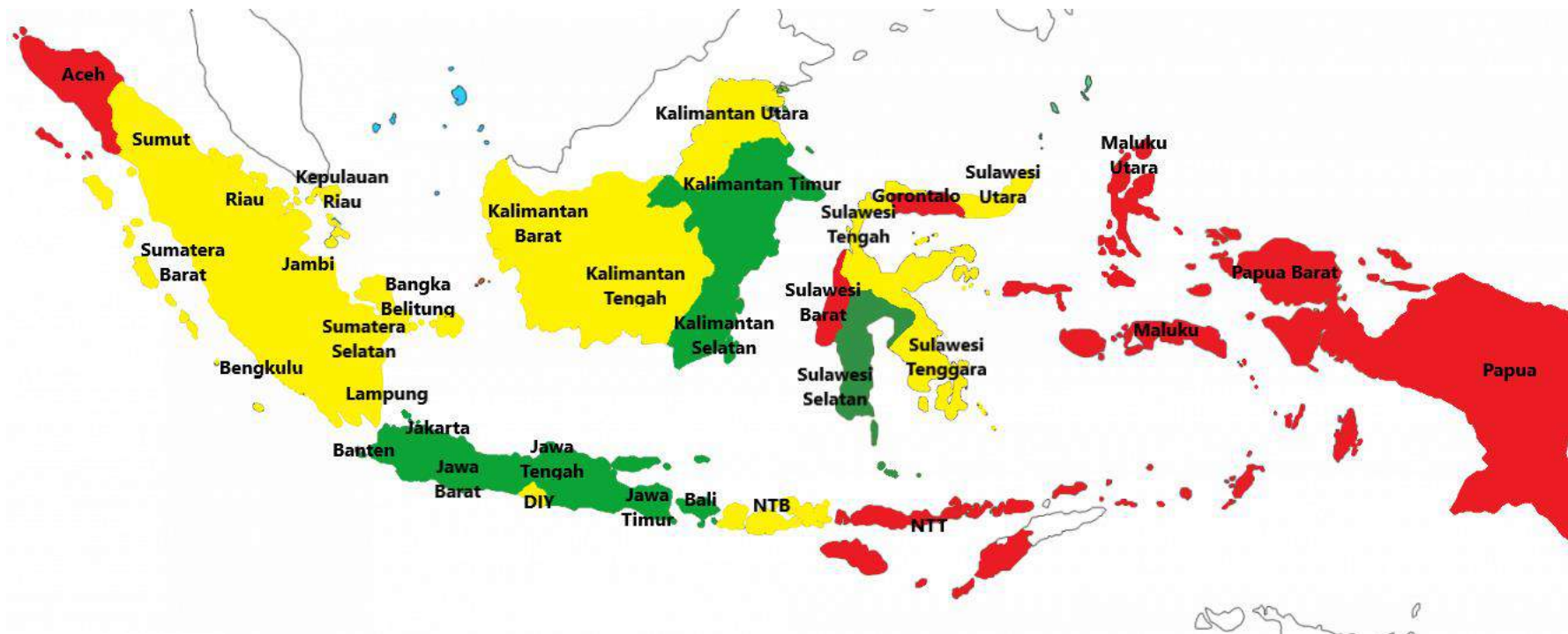
Catatan

1. Untuk menghitung IKF digunakan Total Pendapatan sebagai *proxy* Belanja.
2. Tanda** berarti IKF Tahun Anggaran 2019 dihitung berdasarkan LKPD yang belum diperiksa BPK (*unaudited*), sedangkan yang tidak bertanda berarti sudah diperiksa (*audited*).

LAMPIRAN C: PETA KEMANDIRIAN FISKAL PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2018



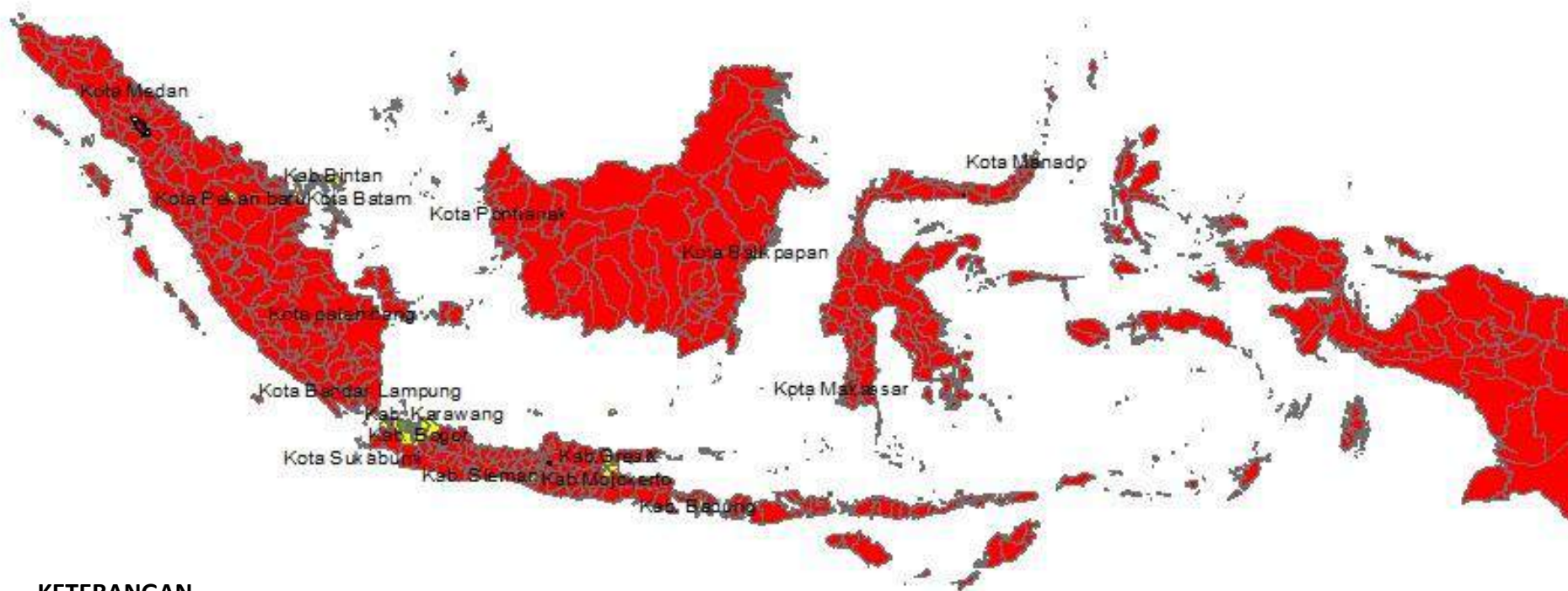
LAMPIRAN D: PETA KEMANDIRIAN FISKAL PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2019



KETERANGAN

- Belum Mandiri
- Menuju Kemandirian
- Mandiri
- Sangat Mandiri

LAMPIRAN E: PETA KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2018







KETERANGAN

- Belum Mandiri
- Menuju Kemandirian
- Mandiri
- Sangat Mandiri

LAMPIRAN F: PETA KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2019



KETERANGAN

-  Belum Mandiri
 Menuju Kemandirian
 Mandiri
 Sangat Mandiri